

**KEBIJAKAN MEKSIKO UNTUK MENANDATANGANI *MERIDA*  
*INITIATIVE* UNTUK MENGHADAPI *DRUG TRAFFICKING*  
*ORGANIZATIONS* DENGAN AMERIKA SERIKAT DI MEKSIKO 2007-  
2012**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**Retno Afifah Puspita**

16323098

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**Kebijakan Meksiko Untuk Menandatangani *Merida Initiative* Untuk  
Menghadapi *Drug Trafficking Organizations* Dengan Amerika Serikat Di  
Meksiko 2007-2012**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**Retno Afifah Puspita**

16323098

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Kebijakan Meksiko Untuk Menandatangani *Merida Initiative* Untuk  
Menghadapi *Drug Trafficking Organizations* Dengan Amerika Serikat Di  
Meksiko 2007-2012**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

18 Agustus 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Gustrieni Putri, S.IP., M.A.
- 2 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 3 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.

Tanda Tangan

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*18 Agustus 2023,*



---

*Retno Afifah Puspita*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR.....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan Penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara.....	12
1.8 Metode Penelitian.....	13
1.8.1 Jenis Penelitian.....	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	14
1.8.4 Proses Penelitian.....	14
1.9 Sistematika pembahasan.....	15
1.9.1. BAB 1. Pendahuluan.....	15
1.9.2. BAB 2. Dinamika Perkembangan Dan Aktivitas <i>Drug</i> <i>DTO</i> Di Meksiko.....	15
1.9.3. BAB 3. Kerja Sama Meksiko Dan Amerika Serikat Dalam Menghadapi <i>DTO</i> Di Meksiko 2007-2012.....	16
1.9.4. BAB 4. Penutup.....	16
<b>BAB 2 DINAMIKA PERKEMBANGAN DAN AKTIVITAS <i>DTO</i> DI MEKSIKO.....</b>	<b>17</b>
2.1 Dinamika Berkembangnya <i>DTO</i> di Meksiko.....	17
2.2 Kondisi Meksiko Sebelum <i>Merida Initiative</i> .....	21

2.3 Kegagalan Meksiko dalam Mengatasi <i>Drug Trafficking</i> Sebelum Perjanjian <i>Merida</i> .....	26
2.3.1. International Opium Commission Conference.....	27
2.3.2. Konvensi Wina 1988.....	27
2.3.3. Kerja sama Antara Inggris, Irlandia Utara, dan Meksiko.....	28
2.3.4. Kerja sama Antara <i>The European Community</i> dan Meksiko.....	29
2.3.5. Treaty on Mutual Legal Assitance in Criminal Matters.....	29
2.3.6. Operasi Michoacan.....	30
<b>BAB 3 KERJA SAMA MEKSIKO DAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENGHADAPI <i>DTO</i> DI MEKSIKO 2007-2012</b> .....	<b>34</b>
3.1 Ancaman Yang Disebabkan Oleh <i>DTO</i> Di Amerika Serikat dan Meksiko.....	34
3.2 Permasalahan Ekonomi Yang Disebabkan <i>DTO</i> Di Meksiko dan Amerika Serikat.....	44
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Rekomendasi.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Komposisi Angkatan Bersenjata Meksiko (1994-2000).....	24
Tabel 3.1. Bantuan Dana <i>Merida Initiative</i> 2008-2010 (dalam juta \$).....	42
Tabel 3.2. Bantuan Dana <i>Merida Initiative</i> 2011-2012 (dalam juta \$).....	42
Tabel 3.3. Kerugian Ekonomi Amerika Serikat Akibat DTO 2009 (Dalam \$).....	47

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Pembunuhan Di Wilayah Amerika Serikat dan Meksiko Akibat DTO 2004-2005 .....	21
Grafik 3.1. Prevelensi Tahunan Penggunaan Narkotika di Kalangan Siswa Meksiko .....	35
Grafik 3.2. Data Ekstradisi Meksiko ke Amerika Serikat 1995-2005 .....	36
Grafik 3.3. Pembunuhan Di Wilayah Meksiko Akibat DTO 2000-2005 .....	37
Grafik 3.4. Prevelensi Tahunan Jenis Penggunaan Narkotika di Amerika Serikat .....	45
Grafik 3.5. Penggunaan Narkotika Jenis Kokain di Amerika Serikat (Umur 13-18 tahun) .....	46
Grafik 3.6. Pembagian Anggaran Dana Merida Initiative .....	49
Grafik 3.7. Ekstradisi Anggota DTO Meksiko ke Amerika Serikat 2007-2012 .....	50



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1. Operasi anti narkoba di Meksiko.....41

## ABSTRAK

*Merida Initiative* merupakan perjanjian yang disepakati oleh Meksiko dan Amerika Serikat untuk menghadapi permasalahan *Drug Trafficking Organizations* di Meksiko. Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 2007. Perjanjian ini disepakati oleh kedua negara dilandaskan oleh faktor keamanan yang berdampak pada kedua negara, terutama di wilayah perbatasan. Adapun tujuan dicantumkan dalam perjanjian tersebut antara lain untuk meminimalisir dan menghapus organisasi kriminal di Meksiko, memperkuat wilayah perbatasan udara dan maritime, meningkatkan kapasitas sistem peradilan daerah, dan mengurangi permintaan narkoba. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas mengenai faktor yang menyebabkan Amerika Serikat menandatangani *Merida Initiative* dengan Meksiko menggunakan teori Kerja Sama Internasional. Teori tersebut akan digunakan untuk memahami alasan suatu negara membentuk kerja sama.

***Kata kunci: Merida Initiative, Drug Trafficking Organizations, Amerika Serikat, Meksiko, kerja sama internasional***

## ABSTRACT

*Merida Initiative* is an agreement by Mexico and the United States to deal with *Drug Trafficking Organizations* in Mexico. This agreement was signed by the two countries in 2007. This agreement was agreed by the two countries based on security factors that impacted both countries, especially in the border area. The objectives stated in the agreement include minimizing and eliminating criminal organizations in Mexico, strengthening the air and maritime border areas, increasing the capacity of the regional justice system, and reducing demand for narcotics. Therefore, this research will discuss the factors that caused the United States to sign the *Merida Initiative* with Mexico using the theory of *International Cooperation*. The theory will be used to understand the reasons for a country to form cooperation.

***Key words: Merida Initiative, Drug Trafficking Organizations, United States, Mexico, international cooperation***

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Drug Trafficking* merupakan salah satu bentuk ancaman keamanan non tradisional. Ancaman-ancaman tersebut tidak hanya ditimbulkan oleh militer ataupun negara, tetapi juga aktor non negara. Kejahatan transnasional ini dapat dilakukan oleh suatu kelompok atau bahkan secara individu. Yang berbahaya dari *drug trafficking* ini ialah, dampak yang diberikan tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi setiap individu di dalam masyarakat (Miraglia, Ochoa and Briscoe 2012, 4)

Dilihat dari subjek sasaran dari dampak yang diberikan, maka transaksi jual beli obat merupakan salah satu isu yang perlu ditangani. Hal utama yang perlu ditangani dari isu ini yaitu melalui pengedar dari obat-obat terlarang itu sendiri. Pemerintah tidak dapat hanya berfokus pada penanganan di tingkat domestik saja, karena dalam *drug trafficking* ini sendiri tidak terlepas dari *supply-demand*, yang mana hal ini berkaitan dengan negara produsen, konsumen, ataupun distributor. Negara produsen dan distributor merupakan aktor utama dalam permasalahan *drug trafficking* ini, karena dari merekalah obat-obat terlarang tersebut diproduksi dan diedarkan. Salah satu hubungan antar negara produsen atau distributor dengan negara konsumen dalam kegiatan *drug trafficking* ialah Amerika Serikat dan Meksiko (O.Finckenauer, Fuentes and L.Ward 2007, 1)

Pada awalnya Meksiko bukan merupakan negara pengedar narkoba yang besar, Meksiko hanya merupakan negara transit narkoba dari negara produsen ke Amerika Serikat. Namun permintaan yang besar dari Amerika Serikat juga membuat produksi dan distribusi narkoba di Meksiko berkembang lebih besar. Selain itu kesepakatan mengenai kebijakan non-tariff antar kedua negara ini lebih mempermudah transaksi peredaran narkoba (Cadot and Malouche 2012).

Dalam proses perkembangan produksi dan distribusi narkoba di Meksiko, maka mulai muncul *Drug Trafficking Organizations* (DTO) baru. DTO di Meksiko semakin berkembang pada masa pemerintahan presiden Carlos Salinas De Gortari dari *Institutional Revolutionary Party* (PRI), yang merupakan politikus dan ekonom di Meksiko. Hal ini dikarenakan beberapa instansi pemerintah Meksiko sendiri terlibat dalam perdagangan narkoba. Disini DTO di Meksiko mendapat perlindungan dari pemerintah, yang mana oknum kepolisian dan pengadilan federal pun terlibat dalam kasus ini, baik itu dalam aspek penjagaan bandara, ladang produksi, hingga pengiriman (Torre 2008, 38).

Selama masa jabatan presiden Salinas yaitu pada tahun 1988-1994, Meksiko juga dihadapkan dengan isu korupsi di negaranya. Banyak tokoh-tokoh dari PRI yang terlibat dalam kasus korupsi, yang mana kasus korupsi ini cenderung kepada bentuk kerja sama dengan oknum pedagang narkoba. Beberapa contoh kasus korupsi tersebut yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh dua anak dari Hank Gonzales, yaitu Jorge Hank Rohn dan Charlos Hank Rohn. Keduanya bekerja sama dengan Juan Garcia Abrego, yang merupakan pembentuk dari kartel Gulf dalam hal produksi narkoba dengan berinvestasi sekitar 100 juta dollar di perkebunan. Sedangkan Carlos yang memiliki maskapai penerbangan, membantu

*Drug Trafficking Organizations* (DTO) untuk mengirimkan kokain dari Kolombia (Martinez 2013, 279).

Presiden Salinas bersama partainya telah berupaya dalam meminimalisir perdagangan narkoba tersebut, hal ini dapat dilihat dari kesepakatan yang dibuat oleh presiden Salinas dengan George W. Bush yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Texas. Salinas dan Bush sepakat atas kampanye untuk melawan *drug trafficking*, kesepakatan ini juga didasari oleh Texas yang berbatasan langsung dengan Meksiko. Selain itu Meksiko juga melakukan kerja sama dengan *Drug Enforcement Administration* (DEA) yang menghasilkan *Northern Border Task Force*. Namun upaya-upaya ini dinilai tidak maksimal karena korupsi yang marak terjadi di Meksiko menyebabkan pendanaan upaya-upaya tersebut terhambat. Hal ini masih terjadi hingga pada masa pemerintahan presiden Ernesto Zedillo yang juga merupakan bagian dari PRI (Cardash, J.Cilluffo and Tussing 2011, 2).

Angka korupsi yang tinggi tersebut terus meningkat hingga pemerintahan Presiden Vicente Fox. Setelah tahun 2000, Presiden Vicente memperkuat sistem pertahanan dan keamanan domestiknya, dengan memperkuat sistem kemiliteran negara. Upaya ini menyebabkan mulai munculnya perlawanan DTO terhadap pemerintahan, untuk mempertahankan aktivitas yang mereka lakukan, yaitu *drug trafficking* (Chabat 2010, 1-6)..

Pada masa pemerintahan Presiden Calderon, 11 hari setelah inagurasinya mulai mengimplementasi operasi di wilayah Michoacan. Operasi ini dilakukan atas dasar permintaan pemerintah setempat, yaitu Lazaro Cardenas Batlel. Setelah di Michoacan, Calderon melanjutkan operasi ini di berbagai wilayah lain. Setelah

kewenangannya pada juli 2006 dengan hasil vote 35,88% mengalahkan Andry Roberto Madrazo dari partai PRI, Calderon mempunyai dua tugas utama, yaitu membentuk pemerintahan dan menyusun agenda presidensial (Chabat 2010, 1-6).

Namun pada awal tahun 2007, tidak lama setelah dijalankannya operasi Michoacan, Calderon dihadapkan dengan 7 organisasi kartel yang menyerang satu sama lain atas jalur dagang narkoba. Selain itu, *Drug Trafficking Organizations* (DTO) juga melakukan perlawanan terhadap penegakan hukum dengan melakukan tindakan kriminal seperti membunuh *kidnapping*, ataupun *human trafficking* karena menyempitnya peluang DTO untuk melakukan perdagangan narkoba. Posisi pemerintahan Meksiko tidak cukup kuat dan efektif dalam mengambil tindakan nyata dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyebab ini juga tidak terlepas dari perekonomian Meksiko yang lemah, sehingga tidak dapat mengoptimalkan upaya perlawanan terhadap perdagangan narkoba (Astorga and Shirk 2010, 19-20).

Akhirnya Presiden Calderon berupaya meningkatkan keamanan negara dengan bekerja sama dengan Amerika Serikat. Dalam kerja sama ini kedua negara merencanakan untuk meningkatkan keamanan regional dengan mengendalikan imigrasi, perdagangan senjata, dan mengatasi aktivitas kriminal *Drug Trafficking Organizations* (DTO). Rencana ini dikembangkan hingga mencapai kesepakatan antar kedua negara pada tahun 2007 berupa perjanjian *Merida Initiative*, yang mana Meksiko mendapat bantuan dana dari Amerika Serikat untuk melawan DTO (Chabat 2010, 8).

Akan tetapi tidak lama setelah implementasi tersebut, pemberontakan semakin meningkat, terlebih kriminalitas diwilayah perbatasan Amerika Serikat

dan Meksiko, yaitu Texas. Dimana pada tahun 2010, di wilayah perbatasan tersebut ditemukan pembunuhan sebanyak 3100 orang. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat, karena kemungkinan aktivitas kriminalitas tersebut menyebar di wilayah lain negaranya. Oleh karena itu Amerika Serikat sepakat untuk terus melanjutkan kerja samanya bersama Meksiko agar tidak terjadi pemberontakan yang semakin meluas (Corre-Cabrera, Keck and Nava 2015, 79).

Berdasarkan artikel tersebut, selama menjalankan perjanjian tersebut, Amerika Serikat dan Meksiko dihadapkan pada beberapa hambatan. Pendanaan *Merida Initiative* pada masa pemerintahan Calderon dibagi dalam dua sesi. Pada sesi pertama alokasi dana *Merida Initiative* lebih difokuskan untuk kekuatan militer, akan tetapi kedua negara dihadapkan pada permasalahan tindakan kriminal yang meningkat, karena adanya perlawanan dari *Drug Trafficking Organizations* (DTO). Oleh karena itu sesuai dengan kesepakatan kedua negara, pada pendanaan *Merida Initiative* sesi kedua, Amerika Serikat dan Meksiko lebih memfokuskan untuk meningkatkan penegakan hukum. Penelitian ini akan lebih lanjut menganalisis kerja sama Meksiko dan Amerika Serikat dalam *Merida Initiative* untuk melakukan perlawanan terhadap *Drug Trafficking Organizations* (DTO) melalui sudut pandang teori kerja sama internasional yang dikemukakan oleh K.J Holsti.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengapa Meksiko memutuskan untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam menghadapi *Drug Trafficking Organizations* (DTO) di Meksiko melalui perjanjian *Merida Initiative* pada tahun 2007-2012?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana kerja sama Meksiko dan Amerika Serikat dalam menghadapi *Drug Trafficking Organizations* di Meksiko pada tahun 2007-2012.

## **1.4 Cakupan penelitian**

Dari penelitian ini, penulis akan meneliti permasalahan *drug trafficking* di Meksiko pada rentang waktu tahun 2007 ketika kerja sama *Merida Initiative* dimulai hingga 2012 saat pemerintahan Presiden Felipe Calderon berakhir. Dari studi kasus yang diangkat oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa cakupan penelitian ini adalah pertahanan dan keamanan negara Meksiko. Kurang optimalnya Meksiko dalam memenuhi kesepekatan dengan Amerika Serikat pada hubungan bilateral tersebut, mengakibatkan peningkatan tindakan kriminal yang signifikan. Peningkatan tindakan kriminal oleh *Drug Trafficking Organizations* (DTO) ini disebabkan oleh perekrutan anggota kartel dengan latar belakang militer. Sebagian besar penelitian lain juga kurang menyoroti dari sisi permasalahan domestik dan ketergantungan Meksiko dalam sektor perdagangan narkoba. Oleh karena itu, penulis akan berfokus pada peluang dan hambatan Meksiko dan Amerika Serikat selama menjalankan kebijakan *Merida Initiative* di tahun 2007-2012.



## 1.5 Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai upaya Meksiko memerangi perdagangan narkoba dapat ditemukan pada beberapa riset yang telah berjalan sebelumnya. Upaya memberantas perdagangan narkoba yang terjadi di Meksiko ini juga tidak terlepas dengan Amerika Serikat dalam membantu pemberantasan perdagangan narkoba tersebut. Nickolas Emilio yang secara garis besar menyinggung peran dan fungsi Amerika Serikat sebagai negara maju yang gagal dalam melawan *drug trafficking* di negaranya. Menurut Emilio, Amerika Serikat terlalu mengutamakan keuntungan untuk negaranya sendiri.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara konsumen narkotika terbesar, pernyataan tersebut didukung oleh tingkat penyalahgunaan dan permintaan atas narkotika yang tinggi di Amerika Serikat. Sehingga hal ini menyebabkan negara produsen memandang Amerika Serikat sebagai negara strategis untuk melakukan perdagangan narkotika. Dalam perjanjian *Merida Initiative* Amerika Serikat memiliki peran yang besar, karena bantuan dana yang diberikan kepada Meksiko untuk melawan DTO (*Drug Trafficking Organizations*) di Meksiko. Emilio menilai bahwa Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki teknologi, perekonomian, dan sistem militer yang kuat telah gagal dalam menghentikan angka permintaan narkotika di negaranya. Secara keseluruhan tulisan ini memandang optimis Amerika Serikat sebagai negara yang maju dan memiliki pengaruh yang besar di dunia seharusnya mampu memberantas *drug trafficking* di negaranya, mengingat kemajuan aspek yang dimiliki oleh Amerika Serikat (Cadot and Malouche 2012, 189-212).

Pandangan optimis Nickolas Emilio mengenai peran Amerika Serikat dalam kerja sama dengan Meksiko dalam memberantas perdagangan narkoba didukung oleh Armando Rodriguez Luna. Di dalam tulisannya Armando mengatakan bahwa Amerika Serikat terlalu fokus pada upaya perlawanan terhadap DTO. Akan tetapi tindakan kriminal DTO ini didukung oleh teknologi persenjataan, yang mana Amerika Serikat sendiri merupakan pemasok persenjataan terbesar bagi DTO Meksiko. Pada lima tahun awal diberlakukannya *Merida Initiative*, pemerintah Meksiko berhasil menangkap beberapa anggota DTO dan menyita persenjataan anggota DTO, yang mana 87% persenjataan tersebut berasal dari Amerika Serikat (Luna 2018, 86).

Berbeda dengan kedua pendapat di atas yang menganggap Amerika Serikat gagal dalam kasus perdagangan narkoba. Terdapat beberapa artikel yang menyatakan bahwa kegagalan kerja sama tersebut bukan merupakan kesalahan dari Amerika Serikat. Seperti halnya dalam artikel yang ditulis Mayor JG Hanson, menyatakan bahwa kegagalan pemecahan masalah *drug trafficking* ini sendiri datang dari negara produsen dan distributor. Penulis beranggapan bahwa Meksiko tidak didukung oleh orang-orang Meksiko sendiri, dimana korupsi dan penegakan hukum dilanggar oleh instansi pemerintahan itu sendiri. Sehingga Hanson menilai bahwa Meksiko gagal dalam menjalankan upaya perlawanannya dengan *Drug Trafficking Organizations* (DTO), karena Meksiko sendiri tidak dapat menyelesaikan permasalahan internal dalam pemerintahannya (Hanson, Presiden Felipe Calderon's 'War Against Organized Crime': Treating The Symptoms But Not The Sickness 2013, 11-18).

Sementara itu Sabrina Abu Hamdeh menjelaskan kegagalan pemberantasan narkoba di Meksiko disebabkan karena Meksiko terlalu bergantung kepada Amerika Serikat dalam melawan DTO. Kerja sama kedua negara didasarkan atas komponen bantuan dana, yang mana kerja sama tersebut tidak dijalankan secara terus menerus. Amerika Serikat sendiri sepakat untuk menjalankan kerja sama ini untuk meningkatkan peradilan, penegakan hukum dan militer di Meksiko, sehingga Meksiko dapat memiliki kapabilitas sendiri untuk melawan DTO setelah berakhirnya perjanjian Merida Initiative ini (Hamdeh 2011, 48-51).

Pernyataan ini juga didukung oleh Dominic Gracia, yang mana menyatakan bahwa kegagalan Meksiko dalam memberantas DTO dikarenakan oleh masalah perekonomian yang ada di Meksiko. Disini DTO di Meksiko mendapatkan perlindungan dari pemerintah dalam melakukan distribusi narkoba. Upaya pendanaan pemberantasan DTO yang dilakukan Meksiko juga tidak maksimal karena tingginya tingkat korupsi di Meksiko (Gracia 2012, 37-42).

Begitu pula dengan pendapat yang disampaikan Brianna Madison Canning dalam artikelnya. Canning berpendapat bahwa kegagalan pemberantasan narkoba di Meksiko disebabkan oleh pemerintahan itu sendiri yang terlalu fokus pada jalur militerisasi tanpa melihat apa penyebab dibalik meningkatnya kriminalisasi yang dilakukan oleh DTO. Upaya peningkatan militer demi melawan DTO ini dinilai gagal karena strategi tersebut tidak cukup kuat untuk melawan DTO dan menyebabkan kemunculan permasalahan baru, yaitu peningkatan tindakan kriminal yang signifikan. Pemerintah berusaha untuk menekan perdagangan narkoba oleh DTO, tanpa melihat apa penyebab DTO

mengandalkan perdagangan narkoba sebagai sumber ekonomi mereka (Canning 2021, 94-96).

Penelitian ini akan mencoba melihat dari sisi yang berbeda, di mana penulis akan melihat lebih dalam dasar dari Meksiko memutuskan untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dengan perjanjian *Merida Initiative*. Penulis sependapat dengan apa yang disebutkan oleh Hanson, Sabrina, Canning, dan Gracia dalam artikelnya, bahwa kegagalan pemberantasan perdagangan narkoba di Meksiko bukan disebabkan oleh buruknya kerja sama Amerika Serikat dan Meksiko, akan tetapi disebabkan permasalahan internal di Meksiko itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis juga tidak hanya fokus terhadap kerja sama Merida Initiative, tetapi juga melihat dari akar permasalahan dari kasus ini sendiri, yaitu pemerintahan Meksiko dan DTO di Meksiko.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan teori kerja sama internasional yang digagas oleh K.J Holsti. Kerja sama internasional merupakan dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu, sehingga dapat menghasilkan suatu kesepakatan untuk dipenuhi oleh semua pihak. Kerja sama ini dapat berbentuk kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral. Adapun kerja sama antara Meksiko dan Amerika Serikat pada tahun 2007, yang kemudian menghasilkan kesepakatan antar kedua negara dalam *Merida Initiative*. Terbentuknya perjanjian ini didasarkan oleh isu serupa yang dihadapi oleh Meksiko dan Amerika Serikat, yaitu permasalahan yang timbul karena *Drug Trafficking Organizations* (DTO). Dalam kerja sama

*Merida Initiative* antara Meksiko dan Amerika Serikat ini, terdapat beberapa upaya untuk mewujudkan dan mengimplementasi kerja sama tersebut.

Pada umumnya alasan mengapa suatu negara melakukan kerja sama dengan negara lain, yaitu karena negara tersebut tidak dapat mencapai tujuan, kepentingan, atau menyelesaikan ancaman yang ada di negaranya dengan kapabilitas yang mereka. Sehingga negara tersebut membutuhkan negara lain yang memiliki isu atau kepentingan yang serupa dengan bekerja sama membuat suatu kebijakan. Adapun alasan lain yang dinyatakan oleh Holsti mengapa suatu negara melakukan kerja sama internasional, antara lain:

1. Adanya permasalahan ekonomi yang serupa antar aktor, sehingga memungkinkan para aktor untuk membentuk blok perdagangan ataupun koalisi diplomatik. Sehingga akan terbentuk suatu aliansi, salah satunya aliansi mengenai pertahanan terhadap “musuh” bersama. Yang mana salah satu negara dari aliansi tersebut menawarkan kapabilitas militernya pada negara lainnya untuk membantu pemerintah negara tersebut demi kepentingan bersama.
2. Persepsi yang sama mengenai adanya suatu ancaman dan rasa tidak aman, hingga menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran terhadap “musuh”. (Holsti, Politik Internasional Kerangka Analisa 1987, 150).

Kerja sama internasional tidak terlepas dari komponen diplomasi yang mana akan menghasilkan sebuah kebijakan yang disepakati bersama. Oleh sebab itu diplomasi menjadi sarana yang penting demi kedua negara mencapai kepentingannya, baik itu kepentingan ekonomi maupun keamanan. Holsti juga menyatakan bahwa kebijakan juga mempunyai komponen lain berupa tindakan,

yang mana tindakan yang dilakukan suatu pemerintahan terhadap pemerintahan lain ialah untuk mencapai atau mempertahankan tujuannya. Tindakan ini dapat digambarkan dalam beberapa bentuk, contohnya ialah memberikan bantuan luar negeri, menyampaikan suatu peringatan berupa pesan diplomatic, hingga pemboikotan demi kebaikan masing-masing negara. Holsti juga menjelaskan bahwa dalam melakukan kerja sama, masing-masing negara akan merumuskan tujuan-tujuan negaranya, memilih dari sekian banyak tindakan, dan mempergunakan kapabilitas negaranya untuk mencapai tujuan tersebut (Holsti, Politik Internasional Kerangka Analisa 1987, 205).

Dalam kerja sama dan perjanjian yang terjadi antara Meksiko dan Amerika Serikat dalam perlawanan terhadap *Drug Trafficking Organization* (DTO) ini, terdapat salah satu komponen tindakan dimana Amerika Serikat memberikan bantuan luar negeri berupa dana kepada Meksiko. Bersamaan dengan pendanaan ini, kedua negara juga menyepakati tujuan-tujuan *Merida Initiative* untuk dicapai bersama dan sebagai tolak ukur kinerja kedua negara dalam menjalankan perjanjian.

### **1.7 Argumen Sementara**

Sebagai sebuah negara yang memiliki citra sebagai negara dengan tingkat *drug trafficking* yang tinggi, Meksiko harus bekerja ekstra untuk menurunkan serta menghilangkan stigma yang telah ditanamkan oleh masyarakat global terhadap Meksiko itu sendiri. Akan tetapi karena kapabilitas yang kurang, Meksiko tidak dapat mengatasi isu ini sendiri. Oleh karena itu Meksiko melakukan upaya dengan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengambil

tindakan melalui *Merida Initiative*. Hal ini dapat ditinjau lebih lanjut dengan kerangka teori yang diungkap oleh Holsti mengenai kerja sama internasional.

## **1.8 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang dimaksud ialah berasal dari laporan-laporan yang dikeluarkan instansi pemerintah dan organisasi-organisasi internasional. Sedangkan sumber sekunder diambil dari jurnal-jurnal serta berita yang dibuat oleh badan penelitian yang telah melakukan penelitian sesuai dengan isu yang telah diangkat dalam rumusan masalah.

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Riset ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam ilmu sosial dan politik, metode kualitatif dijadikan acuan utama dalam penelitian. Hal ini dilatar belakangi oleh ilmu sosial dan politik yang didasarkan atas perkembangan interaksi sosial, dan juga ilmu sosial yang tidak bersifat absolut, maka tidak sepenuhnya dapat dihitung. Penelitian ini juga ingin mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan DTO di Meksiko, sehingga dapat menjelaskan lebih rinci sesuai dengan data dan fakta yang terjadi.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Meksiko, *Drug Trafficking Organizations*, dan Amerika Serikat. Adapun objek penelitian yang akan dibahas adalah kebijakan pemerintah Meksiko, intervensi Amerika Serikat, dan perekonomian Meksiko.

### 1.8.3 *Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam riset ini adalah dengan mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan berupa jurnal-jurnal hasil penelitian, buku, maupun berita. Sedangkan data kuantitatif yang didapatkan melalui data yang diunggah pada website organisasi-organisasi internasional ataupun instansi pemerintah.

### 1.8.4 *Proses Penelitian*

Adapun proses pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain:

#### 1. Pra Riset

Kegiatan yang termasuk dalam pra riset adalah dengan membaca laporan hasil penelitian yang terkait dengan judul.

#### 2. Pengambilan data

Dalam pengambilan data, riset ini mendapatkan data dari sumber sekunder. Yang termasuk dalam data sekunder ialah, jurnal, buku, serta berita yang dibuat oleh badan penelitian.

#### 3. Analisis data

##### a. Mengorganisir data

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan dan memilih data yang sesuai dengan topik yang diangkat

##### b. Membaca semua data

Untuk menyesuaikan dan memahami data yang akan digunakan maka perlu untuk membaca secara menyeluruh



c. Pengkodean data

Langkah ini dilakukan dengan mengelompokkan data-data yang memiliki isi pembahasan yang sama. Kelompok-kelompok data tersebut diberikan kode untuk memudahkan proses analisis

d. Interpretasi data

Langkah ini merupakan tahap terakhir dengan melakukan analisis data yang sudah dikelompokkan, dan menafsirkan makna dari data tersebut.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam proses penyusunan tugas akhir ini sebagai berikut:

### 1.9.1. BAB 1. Pendahuluan

Dalam bab 1 ini akan berisikan pendahuluan pembahasan yang terdiri dari beberapa hal yakni diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah yang penulis ingin uraikan, cakupan penelitian yang akan membahas mengenai batasan-batasan permasalahan, tinjauan pustaka yang penulis gunakan sebagai bahan referensi pembahasan, kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis serta menjawab rumusan masalah dan metode penelitian yang didalamnya terkandung pembahasan mengenai jenis penelitian, metode, objek dan subjek, serta proses penelitian.

### 1.9.2. BAB 2. Dinamika Perkembangan dan Aktivitas *Drug Trafficking*

#### *Organizations* (DTO) di Meksiko

Pada Bab 2 ini akan membahas bagaimana kerja sama antara Amerika Serikat dan Meksiko dalam melakukan perlawanan terhadap *drug trafficking* sebelum

perjanjian Merida Initiative. Selain itu pada bab ini akan membahas mengenai dinamika perkembangan DTO di Meksiko dan kondisi Meksiko sebelum dijalankannya *Merida Initiative*.

#### 1.9.3. BAB 3. Kerja Sama Meksiko Dan Amerika Serikat Dalam Menghadapi *Drug Trafficking Organizations* (DTO) Di Meksiko 2007-2012

Pada bab ini akan berisikan analisa penulis mengenai kerja sama meksiko dan amerika serikat dalam menghadapi *Drug Trafficking Organizations* (DTO) di meksiko pada tahun 2007-2012. Dalam pembahasan ini akan menjelaskan lebih lanjut dengan menggunakan penjelasan yang diungkapkan K.J Holsti dalam teori kerja sama internasional.

#### 1.9.4. BAB 4. Penutup

Bab ini akan mencakup bagian penutup yang memuat kesimpulan yang menyatakan kembali masalah dan analisis masalah penelitian, diikuti dengan saran yang berisi rekomendasi untuk hasil dari implementasi Merida Initiative.

## **BAB 2**

### **DINAMIKA PERKEMBANGAN DAN AKTIVITAS *DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONS* (DTO) DI MEKSIKO**

Bab ini menjelaskan tentang aktivitas perdagangan narkotika dan tindakan kriminal yang ditimbulkan oleh *Drug Trafficking Organizations* (DTO) di Meksiko. Semakin berkembangnya *Organized Criminal Group* dari tahun ke tahun ini menyebabkan Meksiko menjadi salah satu negara terbesar sebagai sumber pengedar narkotika. Untuk penjelasan lebih detail pada subbab pertama penulis akan membahas dinamika berkembangnya DTO di Meksiko. Melihat dari isu yang ditimbulkan oleh DTO yang semakin sulit untuk diatasi. Pada Subbab kedua akan berbicara mengenai kondisi Meksiko sebelum *Merida Initiative*. Lalu pada subbab ketiga akan menjelaskan tentang kegagalan Meksiko dalam mengatasi *drug trafficking* sebelum perjanjian *Merida Initiative*, yang menyebabkan semakin buruknya isu tindakan kriminal dan meningkatnya angka perdagangan narkotika di Meksiko dan Amerika Serikat.

#### **2.1. Dinamika berkembangnya DTO di Meksiko**

Pada awalnya Meksiko bukan merupakan negara pengedar narkotika yang besar, Meksiko hanya merupakan negara transit narkoba dari negara produsen ke Amerika Serikat. Namun semenjak Amerika Serikat memberhentikan sumber-sumber produksi narkotika domestik, Meksiko menjadi alternatif bagi para pengguna narkotika. Semakin berkembangnya produksi dan distribusi narkotika di Meksiko ini, semakin berkembang pula kelompok kriminal Meksiko menjadi *drug trafficking organizations* (DTO) (Lupsha and A 1981, 95-115).

Menurut Peter Lupsha, *organized crime* memiliki tiga tahapan, yang pertama ialah *predatory*, yang mana *organized crime* masih terdiri dari *street gang*, tidak menimbulkan ancaman besar bagi negara, sehingga masih bisa dikendalikan oleh pasukan polisi. Yang selanjutnya ialah tahap *parasitic*, di mana *organized crime* mulai masuk ke ranah pemerintahan, agar dapat beroperasi dengan bebas untuk mencapai tujuannya. Terakhir ialah *symbiotic*, di mana *organized crime* telah menyatu di dalam pemerintahan suatu negara. Ketika aktivitas DTO di Meksiko ini menyebabkan munculnya ancaman bagi keamanan nasional, maka kasus tersebut telah mencapai tahap *parasitic*. Sehingga salah satu tujuan dari *Merida Initiative* ini ialah mengembalikan kasus *drug trafficking* di Meksiko ini ke tahapan *predatory* (Chabat 2010, 9).

Sebelum berkembangnya *drug trafficking* di Meksiko, budidaya opium dan ganja berpusat di negara bagian utara seperti Sinaloa, Sonora, Chihuahua, dan Durango. Menurut kementerian pertanian Meksiko, 30% lahan pertanian di Meksiko digunakan untuk produksi tanaman narkotika. Sehingga budidaya tanaman narkotika ini meluas hingga ke wilayah Michoacan, Guerrero, dan Chihuahua (Meyer, Youngers and Taylor 2007, 2).

DTO yang tumbuh di Meksiko tidak hanya menciptakan masalah penyelundupan narkotika, akan tetapi juga memicu kekerasan bersenjata, seperti penculikan, pembunuhan, dan perdagangan manusia. Keberadaan DTO tersebut tentunya mengancam keamanan nasional Meksiko. Hal ini juga berhubungan dengan Amerika Serikat, yang mana DTO Meksiko mendapatkan persenjataannya dari Amerika Serikat (Jenzen-Jones 2014, 4).

Pihak Amerika Serikat memperkirakan 90% senjata yang masuk ke Meksiko berasal dari Amerika Serikat. Diketahui juga DTO membeli senjata dari Amerika Serikat seperti senapan serbu AK-47, AR-15, dan senjata lainnya. DTO mendapatkan senjata mereka melalui dealer senjata berlisensi dan pameran senjata di wilayah perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, yang nantinya akan dibawa penyelundup melintasi perbatasan (Seelke 2010, 16).

Pada tahun 1970-an Amerika Serikat dihadapkan dengan kasus penyelundupan heroin dalam skala besar, yaitu *French Connection*. Penyelundupan ini dipimpin oleh mafia Prancis yaitu, Paul Carbone ke Amerika Serikat, yang akhirnya menyebabkan pemerintahan Amerika Serikat membuat gerakan untuk memperketat pengawasan jalur perdagangan tersebut. Hal ini memberikan dampak peningkatan permintaan narkotika yang signifikan dari Meksiko. Pada tahun 1991, Meksiko telah menerima permintaan sekitar 300-350 ton kokain dan sekitar 30% permintaan heroin dan ganja di Amerika Serikat diimpor dari Meksiko (Astorga and Shirk 2010, 5).

Pada pertengahan tahun 1980-an, Amerika Serikat melakukan upaya dalam pengurangan perdagangan kokain dengan menutup Florida sebagai jalur perdagangan dari Kolombia. Sehingga Meksiko menjadi pilihan bagi DTO di Kolombia sebagai negara transit untuk menyelundupkan narkotika ke Amerika Serikat. Narkotika yang diproduksi di Kolombia dikirim dari Amerika Selatan melalui pelabuhan Meksiko di wilayah pantai pasifik, Cancun, dan Veracruz. Penyelundupan narkotika ini juga dilakukan melalui jalur darat melalui negara bagian selatan Meksiko dari Guatemala (Meyer, Youngers and Taylor 2007, 3).

Pelibatan Meksiko oleh DTO Kolombia ini menyebabkan *drug trafficking* di Meksiko berkembang dengan pesat dan meningkatkan peran DTO Meksiko dalam bisnis kokain. Sehingga menyebabkan beberapa DTO besar di Meksiko berkembang pesat, seperti: Arellano Felix Organization (AFO), kartel The Sinaloa, The Vicente Carrillo Fuentes Organization (CFO), dan kartel The Gulf (Longmire 2008, 35-52).

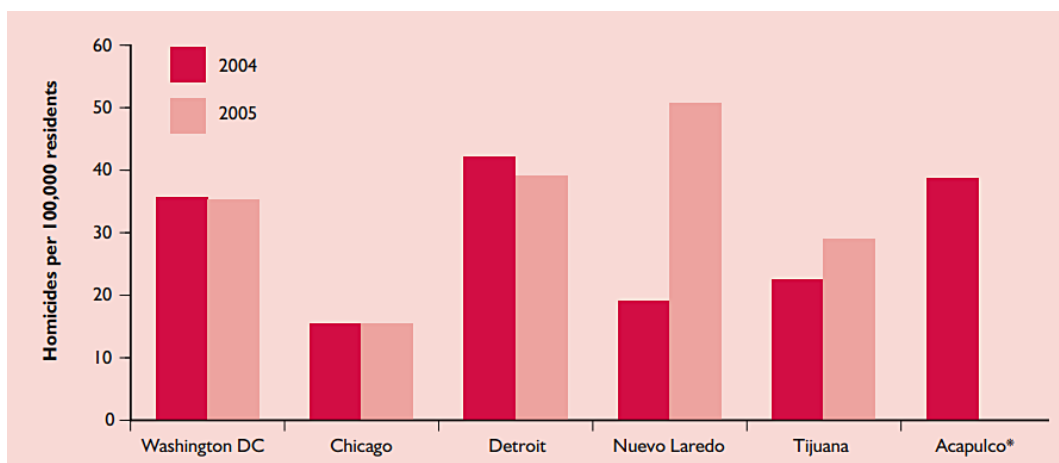
Dampak yang diberikan dari upaya penegakan hukum terhadap *drug trafficking* ini dikenal juga *balloon effect*. Dampak ini digambarkan di mana produksi narkoba yang dipindahkan dari suatu negara ke negara lain untuk menghindari upaya penegakan hukum dan pemberantasan narkotika. Yang mana upaya tersebut pada akhirnya tidak memberikan hasil yang berarti, pemborosan waktu, uang, bahkan nyawa (Windle and Farrel 2012, 2)

Pada pertengahan tahun 1990, kartel narkoba Meksiko menjadi lebih kuat, karena pembubaran kartel Cali dan Medellin di Kolombia. Akibatnya, empat kartel narkoba besar muncul di Meksiko, antara lain Sonora-Sinaloa, Tijuana, Juarez, dan Teluk. Meskipun tingkat kekerasan terkait narkoba rendah, kekuatan pengedar narkoba tumbuh secara signifikan selama pertengahan tahun 1990. Yang membuat Salinas selaku pemerintah Meksiko pada masa itu melakukan beberapa reformasi hukum dan kelembagaan untuk menjaga citra bahwa pemerintah memerangi perdagangan narkoba dan untuk mendapatkan sertifikasi anti narkoba tahunan yang diberikan oleh Departemen luar negeri (Chabat 2010, 3-4).

Peningkatan tindakan kriminal oleh *Drug Trafficking Organizations* (DTO) ini disebabkan oleh perekrutan anggota kartel dengan latar belakang militer. Beberapa contoh DTO yang berhasil merekrut anggota militer sebagai

anggotanya adalah Sinaloa dan Los Zetas. Kartel Sinaloa membentuk kelompok yang dikenal sebagai *Los Pelones* yang anggotanya terdiri dari mantan petinggi militer dan polisi. Adapun Los Zeta yang dikenal sebagai kartel paling berbahaya dan memiliki wawasan teknologi yang canggih. Pada awalnya Los Zetas terdiri dari 31 pasukan lintas udara Meksiko yang membelot dari militer pada tahun 1997. Setelah itu Los Zetas juga merekrut 30 anggota baru dari Kaibiles, yaitu pasukan khusus angkatan darat Guatemala (Brands 2009, 8).

**Grafik 2.1. Pembunuhan di Wilayah Amerika Serikat dan Meksiko  
Akibat DTO 2004-2005**



**Sumber:** (Freeman 2006, 21)

Kekerasan bersenjata yang marak terjadi di Meksiko menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat yang berbatasan langsung dengan Meksiko. Hal ini dikarenakan kemungkinan munculnya ancaman keamanan bagi Amerika Serikat sendiri. Yang mana kekerasan bersenjata merupakan kepentingan yang dibawa oleh Meksiko dalam kesepakatan *Merida Initiative* (Luna 2018, 86).

## **2.2. Kondisi Meksiko Sebelum *Merida Initiative***

Kondisi perekonomian Meksiko yang rendah disebut menjadi salah satu alasan dibalik tingginya kriminalitas terkait DTO di negara tersebut. Kemiskinan, ketimpangan sosial, dan krisis ekonomi dinilai menjadi pemicu masyarakat untuk bergabung dalam DTO sebagai pedagang atau kaki tangan pembunuhan. Hal ini juga yang dilihat oleh anggota DTO untuk merekrut masyarakat dengan perekonomian rendah untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Corre-Cabrera, Keck and Nava 2015, 86).

Fluktuasi perekonomian di tahun 1970-an menyebabkan Meksiko mengalami peningkatan pengangguran karena sedikitnya kesempatan dan lapangan pekerjaan. Di tahun yang sama Meksiko juga mengalami peningkatan permintaan narkoba jenis heroin dari Amerika Serikat. Peningkatan tersebut menyebabkan produksi Heroin meningkat dan menciptakan permintaan tenaga kerja yang besar di Meksiko. Sekitar 50.000 petani menjadi pengusaha narkoba baik secara langsung maupun tidak langsung di Meksiko pada tahun tersebut (Hanson 2013, 12-14).

Maraknya pekerjaan sebagai produsen dan distributor narkoba ini terus berlanjut hingga tahun 1990-an, bahkan diperkirakan bidang pekerjaan tersebut setidaknya menyumbang 40% bagi perekonomian Meksiko pada masa tersebut. Dalam pertengahan tahun 1990, Meksiko mengalami krisis ekonomi yang semakin memperburuk stabilitas ekonomi dan keamanan Meksiko. Kuatnya pengaruh narkoba terhadap perekonomian Meksiko ini membuat pemerintah sulit mempertimbangkan tindakan untuk melawan *drug trafficking* selagi dihadapkan dengan krisis ekonomi ini. Hal ini memberikan kesempatan yang baik



bagi DTO di Meksiko untuk bertahan dan terus berkembang (Hanson 2013, 12-14).

Pada masa pemerintahan Salinas (1988-1994) yang berasal dari *Institutional Revolutionary Party* (PRI), Meksiko juga dihadapkan dengan isu korupsi yang tinggi. Banyak petinggi Meksiko yang terlibat korupsi, yang mana korupsi ini juga merupakan suatu bentuk kerja sama dengan kartel-kartel di Meksiko. Hal ini terus berlangsung selama hegemoni PRI di pemerintahan Meksiko selama beberapa dekade, dan membuat PRI mendominasi pada aspek politik, ekonomi, sosial, militer, dan budaya (P. A. Lupsha 1988, 95-115).

Pada tahun 1988 Presiden Salinas mendirikan *Center for Drug Control Planning* (CENDRO) sebagai pusat *intelligence analysis*. Empat tahun setelahnya, Salinas juga membentuk *National Institute to Combat Drugs/Instituto Nacional para el Combate e las Drogas* (INCD) sebagai upaya menanggulangi perdagangan narkoba. Pada akhir tahun, Salinas juga mereformasi KUHP yang bertujuan untuk memperberat hukuman dan menambah lamanya kurungan pidana bagi pengedar narkoba (Meyer, Youngers and Taylor 2007, 4).

Reformasi lebih sering dan ekstensif selama kurun waktu tersebut, terlebih ketika kekhawatiran Amerika Serikat tentang keamanan Meksiko meningkat karena negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA). Sehingga mempermudah transaksi peredaran narkotika karena adanya kebijakan non-tariff antar kedua negara tersebut. Seiring dengan reformasi kelembagaan, pemerintah berhasil menangkap beberapa pemimpin kartel penting. Meskipun tingkat kriminalitas yang disebabkan oleh DTO di Meksiko rendah pada masa itu,

akan tetapi pengedaran narkoba tumbuh secara signifikan di tahun 1990-an. (Chabat 2010, 4).

**Tabel 2.1. Komposisi Angkatan Bersenjata Meksiko (1994-2000)**

Tahun	Jumlah Anggota Angkatan Darat	Jumlah Anggota Angkatan Laut	Jumlah personel
1994	168.773	48.170	216.943
1995	171.952	53.128	225.080
1996	179.038	53.128	232.166
1997	182.328	54.247	236.575
1998	182.328	53.566	235.894
1999	182.329	54.972	237.301
2000	182.329	55.223	237.552

**Sumber:** (Grayson 2013, 56)

Pada masa pemerintahannya, Zedillo berfokus pada pemberantasan narkoba dan *organized crime* dengan kekuatan militer. Pada tahun 1999, Zedillo membentuk *Federal Preventive Police/Policia Federal Preventiva* (PFP) untuk mencegah kejahatan federal dan meningkatkan sistem penyelidikan kriminal. Pada masa pemerintahan Zedillo, kementerian pertahanan Meksiko mengeluarkan *The Azteca Directive*, yang berisi tentang kebijakan melawan perdagangan narkoba dengan kekuatan militer, program memberantas tanaman narkoba, menyita obat-obatan terlarang, dengan memerangi *organized crime*. Kementerian pertahanan Meksiko juga membuat rencana penanggulangan narkoba dan pengendalian

kriminal melalui operasi gabungan militer dan polisi (*bases de operaciones mixtas*) (Meyer, Youngers and Taylor 2007, 5).

Isu Korupsi yang merajalela di Meksiko masih berlanjut pada masa pemerintahan Ernesto Zedillo (1994-2000). Terdapat satu kasus dimana lebih dari 150 tentara dan perwira diadili karena didapati adanya kerja sama dengan DTO. Bahkan perwira tinggi anti-narkotika Meksiko, yaitu Jesus Gutierrez Rebollo ikut terlibat dalam perdagangan narkotika. Perlibatan militer dalam memberantas DTO ini membuat isu korupsi meningkat, karena terpengaruh oleh DTO yang menawarkan untuk berkerja sama dan memberi uang dalam jumlah besar (Meyer, Youngers and Bewley-Taylor 2007, 9).

Kasus korupsi dan perdangan narkotika ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Akhirnya pada masa pemerintahannya, Amerika Serikat bersama Meksiko pernah membuat kerangka kerja sama berupa *Bi-National Drug Control Strategy* pada tahun 1998. Dalam kerja sama *Bi-National Drug Control Strategy*, kedua negara sepakat bekerja sama untuk menghentikan dan menekan tingkat konsumsi, produksi, dan distribusi narkoba (Storrs 2001).

Pada masa pemerintahan Vincente Fox (2000-2006), keterlibatan petinggi Meksiko dalam perdagangan narkotika masih signifikan. Penyogokkan yang dilakukan oleh narapidana kepada sipir membuat penyaluran narkotika mengalir bebas di dalam penjara. Pemberontakan dan tindakan kriminal juga marak terjadi di dalam penjara, seperti pada kasus pembunuhan saudara dari Joaquin Archivaldo Guzman, ketua kartel Sinaloa (Grayson 2013, 59-62).

Kejadian pada tahun 2004 ini didasari oleh permusuhan dan persaingan antar kartel. Salah satu perlawanan kartel atas penegakan hukum untuk

memberantas DTO ialah terjadinya penangkapan enam pegawai lembaga permasyarakatan Matamoros. Hal ini dinilai sebagai tanggapan kartel atas pengepungan penjara *La Palma* oleh polisi dan militer (Grayson 2013, 59-62).

Pada masa pemerintahannya, Vicente Fox berfokus pada perluasan peran militer dalam upaya penanggulangan narkoba dan pengendalian kriminal, bahkan Fox mengisi lembaga peradilan dengan personel militer. Perluasan peran militer yang dilakukan Fox dapat dilihat melalui peluncuran *Operation Safe Mexico* (*Operativo Mexico Seguro*). Operasi ini dilakukan di wilayah negara bagian utara, antara lain Tamaulipas, Baja California, dan Sinaloa. Kemudian operasi ini diperluas hingga ke Michoacan, Guerrero, dan Chiapas. Pada akhir tahun 2001, Fox mendirikan *Federal Agency of Investigation* (AFI), yang dirancang sebagai FBI versi Meksiko dengan menggunakan teknik investigasi kriminal modern dan ilmiah (Meyer, Youngers and Taylor 2007, 5).

### **2.3. Kegagalan Meksiko dalam Mengatasi *Drug Trafficking* Sebelum Perjanjian Merida**

*Drug trafficking* dan *organized crime* telah menjadi tantangan lama bagi Meksiko. Kapabilitas yang kurang menjadikan permasalahan tersebut sulit dipecahkan oleh Meksiko sendiri. Oleh karena itu kerja sama internasional merupakan tindakan yang menguntungkan bagi Meksiko untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam memerangi *Drug Trafficking organizations* (DTO) (Astorga and Shirk 2010, 19-20).

Kerja sama internasional dinilai sangat penting dalam menangani *drug trafficking* karena sifatnya yang global dan memberikan dampak bagi banyak

negara. Kerja sama internasional juga memungkinkan untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya antar negara. Salah satu contoh poin keberhasilan kerja sama antara Amerika Serikat dan Meksiko ialah, penangkapan mantan gubernur Quintana Roo, yang membantu distribusi kokain berton-ton ke Amerika Serikat pada tahun 2001. Mereka juga menangkap Gilberto Garcia Mena, pemimpin kartel Teluk, dan Alcides Ramon Magana, yang merupakan salah satu pemimpin kartel terkenal yaitu Juarez (Secretary 2001).

Perdagangan narkoba merupakan jaringan kompleks yang menjangkau benua. Tidak hanya melibatkan Meksiko, tetapi juga negara-negara di Amerika Selatan, Amerika Utara, Eropa, hingga Asia. Sebelum bekerja sama memerangi DTO dengan Amerika Serikat melalui *Merida Initiative*, Meksiko juga melakukan kerja sama dengan beberapa negara lainnya (Lopez, Rodil and Vald 2014, 85).

### **2.3.1. International Opium Commission Conference**

Permasalahan budidaya opium menjadi perhatian besar pada masa ini pada tahun 1909. Meningkatnya kekhawatiran atas meluasnya produksi dan penyalagunaan narkoba jenis opium di beberapa negara penghasil opium terbesar pada masa itu. Oleh karena itu pada tahun 1912, Meksiko bersama 13 negara lainnya termasuk Cina, India, dan Amerika Serikat mengadakan *International Opium Commission Conference*. Kerja sama ini memiliki tujuan membentuk kebijakan dalam pengendalian produksi dan distribusi opium (Astorga and Shirk 2010, 22-23).

Kerja sama ini terus berlanjut dan memperluas upayanya hingga tahun 1988 dengan memasukkan pengawasan bentuk-bentuk lain dari *organized crime* dalam agendanya. Namun terlepas dari upaya dari kerja sama tersebut, *organized crime* juga beradaptasi dalam menghadapi penegakan hukum atas *drug trafficking*. Sehingga produksi dan distribusi tetap beroperasi, begitupun dengan permintaan global atas narkotika jenis opium yang terus meningkat dan memicu perkembangan *drug trafficking* dan *organized crime* (Wright 2014, 130-131).

### **2.3.2. Konvensi Wina 1988**

Konvensi Wina merupakan penyempurnaan dari penyempurnaan Konvensi Wina 1961 dan 1971. Konvensi ini ditetapkan untuk sarana yang lebih efektif dalam memberantas penyelundupan narkotika. Tujuan ditetapkannya konvensi Wina 1988 juga untuk meningkatkan sistem pengawasan peredaran narkotika, terutama melalui jalur laut yang sebelumnya tidak ditetapkan dalam Konvensi Wina 1961 dan 1971 (UNODC 2005, 15).

Tantangan terbesar dalam kerja sama ini ialah penerapan langkah-langkah yang tidak konsisten. Selain itu tingkat komitmen setiap negara yang berbeda-beda untuk menjalankan kebijakan menyebabkan kerja sama ini terhambat dan tidak efektif. Sehingga tidak terlihat hasil yang signifikan dari Konvensi Wina 1988 ini (Gurule 2013, 112-115).

### **2.3.3. Kerja sama Antara Inggris, Irlandia Utara, dan Meksiko**

Pada tahun 1990 Meksiko dan Inggris mengadakan pertemuan yang menghasilkan perjanjian atas pengendalian *drug trafficking* dan penyalahgunaan

narkotika. Perjanjian ini meliputi pertukaran informasi mengenai kasus *drug trafficking* yang melibatkan kedua negara, pembagian penyitaan harta kekayaan, serta penyerahan tahanan atas kesaksian dan barang bukti. Kedua negara juga sepakat atas tidak perlu adanya autentikasi dokumen sebagai aturan. Sehingga hal ini menyebabkan kurangnya komitmen antar anggota sehingga sulit untuk menghadapi kelompok kriminal tersebut secara efektif (Beqiraj and Scott 2022, 6).

Pada pertemuan di Meksiko tanggal 26 Februari 1996 kedua negara sepakat untuk memperpanjang perjanjian tentang bantuan timba balik dalam investigasi, pengekangan, dan menyitaan hasil kejahatan. Kedua negara juga menambahkan isi perjanjian mengenai *organized criminal groups*. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya angka kriminalitas di kedua negara yang disebabkan oleh kelompok kriminal. Kemunculan kelompok kriminal yang kuat ini menimbulkan tantangan yang signifikan dalam upaya penegakan hukum. Kebijakan kebijakan yang tidak tepat sasaran dalam menangani strategi dari kelompok kriminal yang terus berkembang menyebabkan kasus *drug trafficking* terus berlanjut di kedua negara tersebut (Beqiraj and Scott 2022, 19-20).

#### **2.3.4. Kerja sama Antara *The European Community* dan Meksiko**

Pada tahun 1997 Uni Eropa dan Meksiko menandatangani perjanjian mengenai pengendalian produksi narkotika, membantu anak jalanan agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dan program membangun keluarga berencana. Perjanjian ini juga diimplementasikan oleh kedua pihak mulai tahun 2000 dengan menambahkan isi perjanjian untuk memerangi *drug trafficking*,

melaksanakan program dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pertukaran informasi mengenai kebijakan legislatif dan undang-undang administratif (Laas and Casinge 2015, 2).

Kerja sama keduanya ini berjalan kurang optimal karena kurangnya komitmen antar negara dan perbedaan kepentingan dalam pembuatan kebijakan. Pendekatan yang terputus-putus dalam implementasi kerja sama ini juga disebut sebagai faktor kerja sama ini tidak berjalan dengan baik. Sehingga menyebabkan pengambilan langkah-langkah pengendalian narkotika dan penegakan hukum yang lemah (Ecorys 2017, 15-18).

### **2.3.5. Treaty on Mutual Legal Assitance in Criminal Matters**

Pada tahun 1998 China menandatangani *Treaty On Mutual Legal Assitance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana) untuk memberi perhatian khusus pada perdagangan narkoba bersama Meksiko, Rusia, dan Pakistan. Perjanjian ini dibuat dengan pembuatan kebijakan mengenai tindakan keras terkait narkoba dan kejahatan transnasional. Pada Tahun 1998 Meksiko dan China juga menandatangani perjanjian mengenai pengendalian narkotika bersama dengan India, Pakistan, Kolombia, dan Tajikistan (Admininstration 2004, 8).

*Mutual Legal Assitance Treaties* (MLATs), merupakan salah satu langkah penting yang dapat diambil dalam kerja sama antar negara. MLAT sebagai perjanjian, menyediakan kerja sama dalam kategori bantuan pengekan hukum. Jenis-jenis bantuan yang diberikan dalam MLAT antara lain:

- a. Melayani pengadilan dan bantuan kesaksian



- b. Permintaan atas pengeledahan dan penyitaan sebagai bukti
- c. Memindahkan tahanan untuk tujuan kesaksian dan ekstradisi
- d. Mengidentifikasi, melacak, serta menyita alat kejahatan maupun harta kekayaan (Kendall and Funk 2014, 1-2).

Selama masa diberlakukannya perjanjian ini, anggota dihadapkan dengan tantangan seperti sumber daya yang terbatas, dan teknik penyelundupan yang semakin canggih oleh para pengedar narkoba. Selain itu kasus korupsi di Meksiko yang tinggi menyebabkan terhambatnya penegakan hukum. Sehingga *drug trafficking* masih menjadi masalah yang sulit diatasi bagi kedua negara tersebut (China 2002).

#### **2.3.6. Operasi Michoacan**

Michoacan merupakan salah satu negara bagian di Meksiko dengan angka kriminalitas yang tinggi, salah satu kartel terbesar disana ialah *La Familia Michoacana*. Pada tahun 2006 terjadi suatu kasus dimana *La Familia Michoacana* melemparkan kumpulan kepala manusia di suatu klub malam. Selain itu di tahun yang sama kelompok tersebut juga pemboman pada hari kemerdekaan Meksiko, yang menewaskan kurang lebih 100 jiwa. Meskipun banyak kartel lain yang beroperasi di Michoana, *La Familia Michoacana* yang dipimpin oleh Nazario Moreno Gonzales atau “El Mas Loco” dinilai paling ditakuti (Horton 2014, 2-3).

Kelompok ini memperoleh keuntungan yang besar dari perdagangan narkoba, dan tindakan kriminal lain seperti penculikan, pencucian uang, dan pemerasan yang menyebar luas disana. Tindakan mereka ini juga dapat berkembang karena adanya bantuan dari para petinggi negara bagian. Selain itu

kartel ini juga membentuk ideologi sendiri yaitu “*primitive, pseudo-religious ideology*”, yang mengusung kepercayaan keadilan sosialnya sendiri. Para anggotanya juga aktif dalam kegiatan sosial demi mempromosikan kepercayaan mereka tersebut, untuk merekrut anggota baru (Horton 2014, 2-3).

Setelah pengukuhan sebagai presiden Meksiko, Felipe membentuk Operasi Michoacan untuk memerangi DTO. Operasi ini dilakukan atas permintaan dari gubernur Michoacan, yaitu Lazaro Cardenas Battel. Dalam beberapa bulan, Calderon juga menerapkan operasi yang sama di beberapa daerah lain seperti Baja California, Chihuahua, Durango, dan Sinaloa (Meyer, Youngers and Bewley-Taylor 2007, 1).

Dalam operasi ini Calderon mengerahkan sekitar 6500 tentara dan polisi untuk melakukan pengamanan di wilayah Michoacan. Beberapa pengamanan yang dilakukan ialah dengan mendirikan penghalang jalan, pos pemeriksaan, mengambil alih area perdagangan narkoba, serta menjalankan surat perintah penggeledahan dan penangkapan terhadap individu yang terlibat dengan perdagangan narkoba (Meyer, Youngers and Bewley-Taylor 2007, 1).

Pengerahan militer besar-besaran untuk memerangi DTO ini memberikan dampak yang besar terhadap Meksiko. Pada tahun 2007 peningkatan angka pembunuhan mencapai hingga 2700 jiwa, yang mana angka tersebut lebih besar dari tahun 2006 yaitu 2100 jiwa, dan 1350 jiwa pada tahun 2005. Peningkatan angka kriminal terus meningkat di wilayah Meksiko, hal ini dikarenakan operasi yang sama juga dilakukan di beberapa negara bagian Meksiko, sehingga menyebabkan beberapa DTO lain juga merasa terancam keberadaannya (Chabat 2010, 5-6).

Tindakan kriminal yang ditimbulkan oleh *Drug Trafficking Organizations* (DTO) ini, akhirnya menyebar luas hingga ke perbatasan Amerika Serikat. Pada Awal tahun 2005, Duta Besar Amerika Serikat di Meksiko pada saat itu, yaitu Tony Garza, mengirim surat protes kepada Luis Ernesto Derbez selaku Menteri Luar Negeri Meksiko. Surat tersebut berisi tentang keluhan mengenai kriminalitas yang meningkat yang disebabkan oleh DTO seperti pembunuhan dan penculikan. Yang mana tingkat kriminalitas yang tinggi ini membawa resiko yang besar bagi warga Amerika Serikat yang tinggal maupun yang melintasi wilayah perbatasan. (Chabat 2010, 5-6).

Dengan keadaan yang semakin mengkhawatirkan ini, Felipe Calderon selaku presiden Meksiko, dan George Bush selaku presiden Amerika Serikat pada masa itu memutuskan untuk bekerja sama untuk melakukan upaya memberantas *Drug Trafficking Organizations* (DTO). Upaya tersebut menghasilkan kesepakatan antar kedua negara untuk membentuk perjanjian *Merida Initiative*, dengan bantuan dana yang akan diberikan oleh Amerika Serikat demi kepentingan bersama.

**BAB 3**  
**KERJA SAMA MEKSIKO DAN AMERIKA SERIKAT DALAM**  
**MENGHADAPI DRUG TRAFFICKING ORGANIZATIONS DI MEKSIKO**  
**2007-2012**

Pada bab ini, penulis ini akan membahas mengenai kerja sama antara Amerika Serikat dan Meksiko dalam memberantas isu peredaran narkoba dan kekerasan bersenjata. Dalam kerja sama *Merida Initiative* ini terdapat kepentingan yang dibawa oleh Amerika Serikat maupun Meksiko. Yang mana dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana keselarasan kepentingan atau kebutuhan masing-masing negara dalam *Merida Initiative*. Kesepakatan antar kedua negara tersebut didasarkan atas kepentingan masing-masing negara yang akhirnya dirumuskan menjadi suatu kebijakan. Kepentingan masing-masing negara tersebut akan dibahas dalam dua subbab. Pada subbab pertama akan membahas mengenai ancaman yang disebabkan oleh DTO di Amerika Serikat maupun Meksiko. Lalu pada subbab selanjutnya akan menjelaskan tentang permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh DTO di Meksiko dan Amerika Serikat

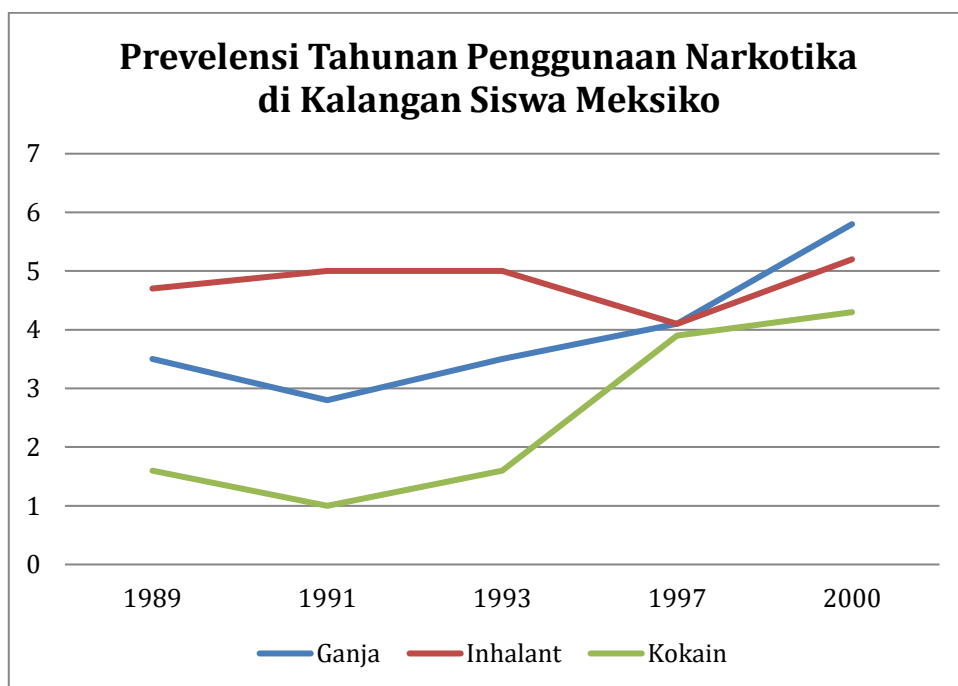
**3.1. Ancaman Yang Disebabkan Oleh DTO Di Amerika Serikat dan Meksiko**

Isu penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika marak terjadi di Meksiko, terlebih Meksiko merupakan produsen dan distributor narkotika yang besar. Meskipun pada awalnya Meksiko memproduksi tanaman-tanaman narkotika untuk obat, akan tetapi permintaan yang besar dari negara lain atas narkotika menjadikan perdagangan gelap narkotika di Meksiko berkembang pesat.

Bahkan institusi pemerintahan, kepolisian, dan peradilan ikut andil dalam perdagangan gelap tersebut. Hal ini pula yang melatar belakangi berkembang pesatnya kartel di Meksiko. Mengakarnya isu perdagangan gelap narkoba ini menjadikan isu tersebut sulit diatasi (Bagley and Magley 1988, 189-212).

Semakin berkembangnya kartel di Meksiko tidak hanya menimbulkan permasalahan penyuludupan narkoba, tetapi juga kekerasan bersenjata. Yang mana banyak terjadi penculikan, pembunuhan, maupun *human trafficking*. Keberadaan kartel-kartel ini tentu mengancam keamanan nasional bagi Meksiko sendiri. Penggunaan narkoba juga semakin meningkat, tidak hanya di kalangan orang dewasa, tetapi juga anak sekolah di Meksiko.

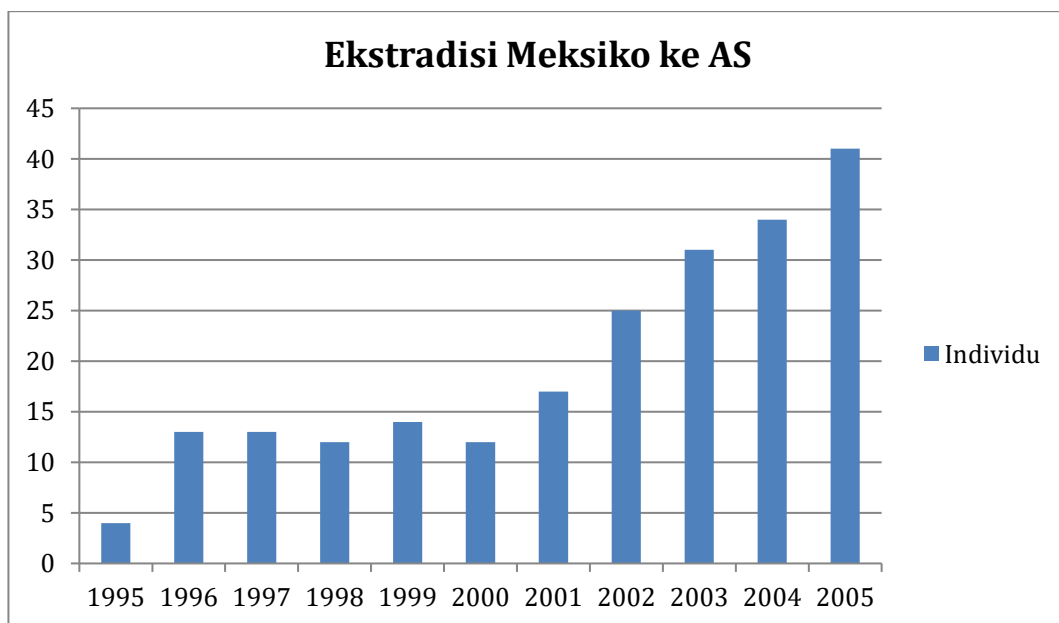
**Grafik 3.1. Prevelensi Tahunan Penggunaan Narkoba di Kalangan Siswa Meksiko**



**Sumber:** (Mora, et al. 2003, 113)

Meksiko tidak memiliki kapabilitas yang cukup untuk menyelesaikan permasalahan di negaranya. Oleh karena itu dengan bekerja sama dengan Amerika Serikat, Meksiko mengharapkan peluang untuk menyelesaikan isu yang ada di negaranya, begitupun Amerika Serikat. Keputusan Meksiko yang menyepakati untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat ini dapat dijelaskan melalui pernyataan Holsti, yaitu suatu negara akan mengkategorikan negara lain dalam membuat kebijakan bersama, antara lain tingkat kecanggihan teknologi, kekuatan militer, dan reputasi suatu negara dalam melakukan kerja sama dan membuat kebijakan luar negeri baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial (Holsti 1987, 103).

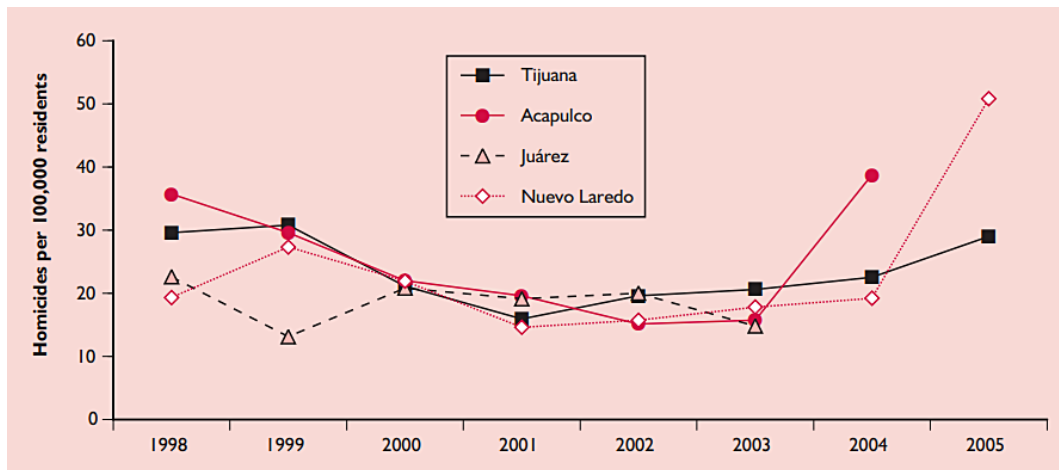
**Grafik 3.2. Data Ekstradisi Meksiko ke Amerika Serikat 1995-2005**



**Sumber:** (Seelke and Finklea 2015)

*Drug Trafficking Organizations* (DTO) Meksiko mendapatkan persenjataannya dari Amerika Serikat. Meskipun pada awalnya kartel membeli senjata dari Amerika Serikat hanya untuk melindungi penyaluran narkotika ke Amerika Serikat. Sebagai produsen dan pengeksport senjata terbesar di dunia pada tahun 2001-2011, hal ini tentu merugikan Amerika Serikat sendiri. Oleh karena itu, selain isu penyeludupan narkotika, Meksiko juga membawa isu kekerasan bersenjata ini dalam kesepakatan *Merida Initiative* untuk menekan angka kekerasan bersenjata yang mengancam keamanan domestiknya, terlebih di wilayah perbatasan seperti Nuevo Laredo (Jenzen-Jones 2014, 4).

**Grafik 3.3. Pembunuhan Di Wilayah Meksiko Akibat DTO 2000-2005**



Sumber: (Freeman 2006, 21)

Selain itu wilayah Meksiko juga berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Hal ini juga melatar belakangi penyebab banyak terjadinya kerja sama antar kedua negara. Kestabilan suatu negara juga dipengaruhi oleh kebijakan luar negerinya. Yang mana kebijakan tersebut sebenarnya tidak hanya memiliki

pengaruh bagi negaranya, tetapi juga negara di sekitarnya baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial (Holsti 1987, 184).

Dalam kerja sama *Merida Initiative*, Meksiko dan Amerika Serikat juga memiliki beberapa hambatan selama berjalannya perjanjian tersebut. Salah satu hambatan itu ialah keterlambatan proses pendanaan oleh Amerika Serikat. Beberapa faktor yang menghambat proses pendanaan dan penyampaian bantuan ke Meksiko tersebut ialah ketentuan standar pendanaan *Merida*, tantangan dalam memenuhi prosedur administrasi, dan Meksiko yang tidak kunjung memberikan jadwal pengiriman bantuan karena perencanaan dana yang belum disiapkan dari Meksiko sendiri, yang akhirnya menyebabkan kekerasan di Meksiko terus berlanjut. Beberapa anggota kongres Amerika Serikat telah mengkritik lambatnya penyampaian dana, pelatihan, dan peralatan. Kekhawatiran juga muncul dari beberapa pihak Meksiko, karena penundaan seperti ini dapat menyebabkan rusaknya dukungan dari Amerika Serikat (E. L. Engel 2010, 2).

Tingkat pelanggaran Hak Asasi manusia yang dilakukan oleh tentara dan pasukan polisi di Meksiko sangat tinggi. Hal ini menyebabkan Meksiko mendapatkan kritik dari Kongres Amerika Serikat dan masyarakat internasional, akan tetapi Meksiko membantah pernyataan tersebut meskipun terdapat laporan kredibel mengenai pelanggaran HAM tersebut. Keterlambatan pendanaan *Merida Initiative* juga disebabkan oleh kondisi HAM di Meksiko, yang mana INCLE dan FMF menahan 15% anggaran sampai pemerintahan Meksiko melaporkan secara tertulis telah mengambil tindakan di tiga bidang yang antara lain:



1. Membentuk komisi pengaduan polisi dan melakukan investigasi yang efektif
2. Meningkatkan dan mereformasi sistem peradilan
3. Menyelidiki dan menuntut pasukan polisi dan militer yang diduga dan terbukti telah melakukan pelanggaran HAM (Seelke 2010, 25-30).

Untuk meningkatkan upaya meminimalisir volume perdagangan narkoba ini, pada tahun 2007, Calderon mengusulkan kepada Presiden Bush selaku Presiden Amerika Serikat pada saat itu, untuk bekerja sama dalam pembentukan perjanjian *Merida Initiative*. *Merida Initiative* merupakan bentuk upaya yang dilakukan Meksiko bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam melawan DTO. Kerja sama ini merupakan bentuk upaya kedua negara dalam melawan DTO. Upaya ini dilakukan dengan cara memperkuat sistem peradilan dan keamanan perbatasan untuk meminimalisir angka permintaan narkoba dan organisasi kriminal yang beroperasi, untuk melancarkan tujuan tersebut, kerja sama *Merida Initiative* memfasilitasi suntikan dana kepada Meksiko sebesar \$1,4 miliar (Brands, Mexico's Narco-Insurgency and U.S. Counterdrug Policy 2009, 21).

Dengan bantuan dana dan teknologi kepada Meksiko ini ditujukan untuk mencapai tujuan dari kerja sama *Merida Initiative*. Adapun empat tujuan utama dari kerja sama *Merida Initiative*, antara lain:

1. Meminimalisir dan menghapus organisasi kriminal yang beroperasi di Meksiko
2. Memperkuat wilayah perbatasan udara dan maritim
3. Meningkatkan kapasitas sistem peradilan daerah

4. Mengurangi permintaan narkoba (E. L. Engel, Status of Funds for the Merida Initiative 2009, 5).

Tujuan-tujuan tersebut akan diupayakan melalui bantuan dana yang diterima Meksiko melalui *Merida Initiative*. Yang mana bantuan dana tersebut akan difokuskan untuk beberapa hal, antara lain:

1. Peralatan inspeksi non intrusif, *ion scanner*, unit anjing pelacak, untuk Meksiko dan Amerika Tengah demi mengurangi perdagangan narkoba, senjata, dan manusia
2. Teknologi untuk meningkatkan dan melindungi sistem komunikasi yang berisi data kriminal di Meksiko
3. Konsultasi teknis dan pelatihan untuk memperkuat peradilan di Meksiko, termasuk pemeriksaan kepolisian nasional yang baru, *software* manajemen kasus untuk melacak investigasi dari data kriminal, program keamanan saksi, dll
4. Pesawat terbang sebagai pendukung aktivitas pengawasan dan penyekatan, serta sebagai respon cepat bagi aparat keamanan di Meksiko
5. Perlengkapan, pelatihan, dan program aksi di Amerika tengah untuk menerapkan langkah-langkah *antigang* dan memperluas jangkauan penerapan langkah-langkah tersebut
6. Perlengkapan, pelatihan, dan dukungan logistik untuk Amerika Tengah demi meningkatkan kesadaran akan *Maritime Domain Awareness* (MDA) dan jangkauan pengamanan (E. L. Engel 2009, 5-6).

Menurut Holsti, kerja sama antar negara tidak hanya ditujukan untuk menghadapi musuh bersama dari luar. Tapi dapat terbentuk untuk melindungi

wilayah mereka dari perpecahan dan revolusi dalam negeri. Tindakan kerja sama tersebut dapat berupa bantuan militer, yang nantinya digunakan oleh penerima bantuan untuk mengatasi pemberontakan (Holsti 1987, 151).

**Gambar 3.1. Operasi anti narkoba di Meksiko**



**Sumber:** (Meyer, Youngers and Bewley-Taylor 2007, 7)

Dengan kesepakatan mengenai pendanaan tersebut, Kongres Amerika Serikat setuju untuk memberikan bantuan dana secara berangsur pada tiga tahun awal, yaitu pada tahun 2008-2010 sebesar \$1,4 miliar (Chabat 2010, 8). Dana yang dialokasikan tersebut berasal dari tiga sumber dana, antara lain *International Narcotics Control and Law Enforcement (INCLE)*, *Economic Support Fund (ESF)*, dan *Foreign Military Financing (FMF)* (E. L. Engel 2009, 9). Untuk pendanaan lebih rinci akan dijelaskan dalam tabel berikut .

**Tabel 3.1. Bantuan Dana *Merida Initiative* 2008-2010 (dalam juta \$)**

<b>Account</b>	<b>FY 2008</b>	<b>FY 2009</b>	<b>FY 2010</b>	<b>Total</b>
ESF	20,0	15,0	9,0	44,0
INCLE	263,5	406,0	365,0	1034,5
FMF	116,5	39,0	265,2	420,7
<b>Total</b>	<b>400,0</b>	<b>460,0</b>	<b>639,2</b>	<b>1499,2</b>

**Sumber:** (Seelke and Finklea, U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond 2017, 11)

Pada tahun 2010 terdapat permintaan anggaran sebesar \$175 juta untuk mendukung reformasi peradilan, anti korupsi, pembangunan institusi, dan aktivitas penegakan hukum dibawah kebijakan *Merida Initiative* (E. L. Engel 2010, 6). Lalu pada pendanaan sesi kedua, pemerintahan Barack Obama mengajukan permintaan anggaran kepada Kongres Amerika Serikat pada tahun 2011 sebesar \$386 juta untuk melanjutkan upaya *Merida*. Pada tahun 2012 *Foreign Military Financing* (FMF) tidak ikut andil dalam bantuan dana *Merida Initiative*. Berikut pendanaan sesi kedua *Merida Initiative* secara rinci:

**Tabel 3.2. Bantuan Dana *Merida Initiative* 2011-2012 (dalam juta \$)**

<b>Account</b>	<b>ESF</b>	<b>INCLE</b>	<b>FMF</b>	<b>Total</b>
2011	18,0	117,0	8,0	143,0
2012	33,3	248,5	-	281,8
<b>Total</b>	<b>51,3</b>	<b>365,5</b>	<b>8,0</b>	<b>424,8</b>

**Sumber:** (Seelke and Finklea 2017, 11)

Anggaran dana *Economic Support Fund* (ESF) untuk *Merida* akan difokuskan untuk meningkatkan upaya penegakan hukum, mempromosikan hak asasi manusia, serta mendukung reformasi sistem peradilan. Salah satu upaya pendanaan dari ESF ini digunakan untuk melakukan pelatihan dan memberikan program pertukaran profesional antara hakim Meksiko dan Amerika Serikat. Sedangkan pendanaan yang berasal dari *International Narcotics Control and Law Enforcement* (INCLE) akan mendukung pemerintahan Meksiko dalam kapasitasnya untuk meningkatkan sistem inspeksi dan keamanan dan meningkatkan kemampuan analisi dan pengelolaan data badan intelijen Meksiko (CISEN). Bantuan dana *Foreign Military Financing* (FMF) akan difokuskan pada bidang keamanan, yaitu untuk meningkatkan pengawasan darat dan laut. Dana tersebut dialokasikan dengan membeli CASA 235 MPA, serta helikopter *Black Hawk* dan Helikopter *Bell* untuk mendukung kegiatan angkatan laut dan darat Meksiko. Dana FMF juga digunakan untuk membeli *ion scanner* untuk mendeteksi perdagangan narkoba dan senjata melalui daerah terpencil di Meksiko (E. L. Engel 2009, 22).

Sesuai dengan konsep kerja sama internasional yang dikemukakan oleh K.J. Holsti yang menyatakan bahwa suatu kerja sama internasional itu tidak dilihat dari perspektif sistem dari suatu perjanjian, akan tetapi dilihat dari perspektif masing-masing negara terhadap perjanjian itu sendiri. Dengan begitu dapat menjelaskan bagaimana tingkah laku suatu negara tidak hanya mengacu pada lingkungan eksternal, tapi dapat lebih mengacu pada keadaan domestik

negara tersebut. Yang mana faktor internal ini akan mempengaruhi kebijakan, aliansi, tujuan, maupun kepentingan suatu negara (Holsti 1987, 23).

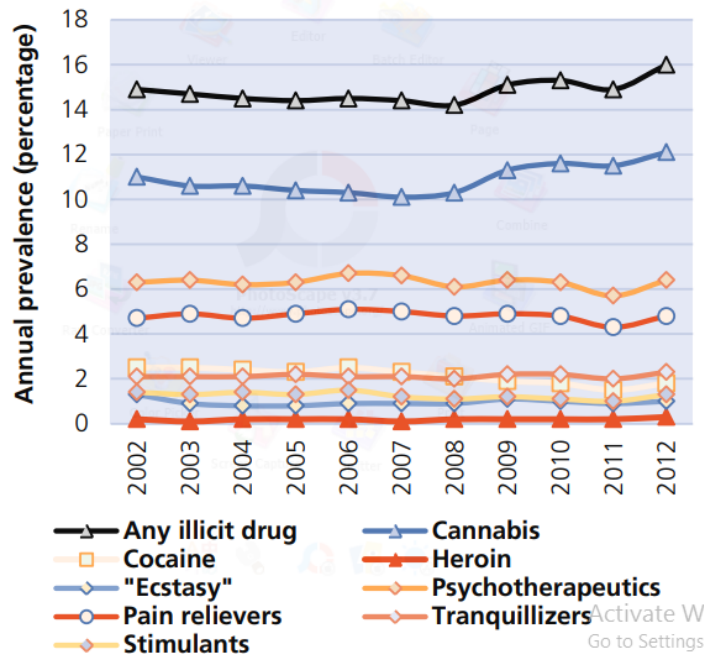
### **3.2. Permasalahan Ekonomi Yang Disebabkan DTO Di Meksiko dan Amerika Serikat**

Dalam membuat kesepakatan untuk akhirnya bekerja sama, kedua negara pasti membawa kepentingannya masing-masing. Hal ini juga diungkapkan oleh Holsti, bahwa suatu negara yang berusaha membangun kerja sama ialah suatu negara yang tidak dapat mencapai tujuan negara, kepentingan negara, ataupun mencegah ancaman di negaranya dengan kapabilitas mereka sendiri. Oleh karena itu negara tersebut membutuhkan negara lain yang memiliki permasalahan dan tujuan yang sama untuk mengatasi isu tersebut (Hosti 1987, 150).

Kepentingan merupakan unsur penting dalam terbentuknya suatu kesepakatan antar aktor yang terlibat. Yang mana keselarasan antar kepentingan setiap aktor dinilai penting dalam sebuah kesepakatan. Dalam kesepakatan *Merida Initiative* ini, Amerika Serikat membawa kepentingannya untuk menekan penyeludupan narkoba dari Meksiko ke negaranya. Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi narkotika yang cukup tinggi. Tingkat konsumsi narkotika jenis kokain di Amerika Serikat mencapai 2,2% dari jumlah populasi di tahun 2002. Hal ini juga berkaitan dengan Meksiko sebagai pemasok utama narkotika Amerika Serikat (SAMHSA, Results From the 2012 National Survey on Drug Use and Health: Summary of National Findings 2013, 1-2). Berikut data statistik penggunaan narkotika di Amerika Serikat pada tahun 2002-2012.

**Grafik 3.4. Prevelensi Tahunan Jenis Penggunaan Narkotika di Amerika**

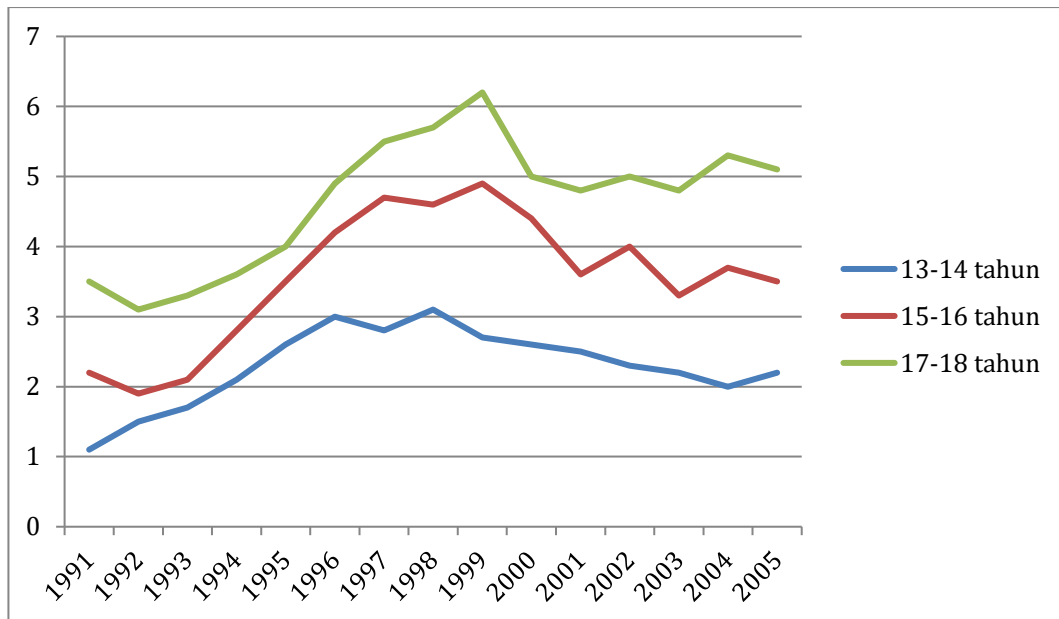
**Serikat**



Sumber: (UNODC 2014, 14)

Dilihat dari tingginya angka konsumsi narkoba di Amerika Serikat menjadi latar belakang mereka untuk membuat kesepakatan ini dengan Meksiko. Untuk mendukung upaya ini, Amerika Serikat juga memfasilitasi Meksiko dengan bantuan dana. Selain itu kekerasan bersenjata yang marak terjadi di Meksiko menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat yang berbatasan langsung dengan Meksiko. Hal ini dikarenakan kemungkinan munculnya ancaman keamanan bagi Amerika Serikat sendiri. Yang mana kekerasan bersenjata merupakan kepentingan yang dibawa oleh Meksiko dalam kesepakatan *Merida Initiative* (Luna 2018, 86).

**Grafik 3.5. Penggunaan Narkotika Jenis Kokain di Amerika Serikat (Umur 13-18 tahun)**



**Sumber:** (UNODC, 2010)

Ancaman yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya berdampak bagi keamanan nasional saja, tetapi juga pada bidang pendidikan, ekonomi maupun kesehatan. Penyalahgunaan narkotika banyak terjadi di kalangan usia 15-35 tahun, terutama pada kalangan usia 18-25 tahun. Anak-anak sekolah yang menggunakan narkotika sering menderita gangguan ingatan, kemampuan intelektual yang rendah, serta gangguan fungsi sensorik. Di Amerika Serikat penggunaan narkotika di kalangan remaja sangat tinggi. Yang mana hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintahan, karena dampak yang diberikan dapat berpengaruh pada individu jangka panjang (UNODC 1998, 9-10).

Penggunaan narkotika pada kalangan pekerja juga marak terjadi di Amerika Serikat. Pada tahun 1995 diperkirakan 25% dari 12,8 juta penyalahguna



narkotika di Amerika Serikat adalah pekerja. Hal ini tentu mempengaruhi produktivitas kerja yang akan membebankan perusahaan. Yang mana pekerja yang menyalahgunakan narkotika kerap ditemukan tidak hadir atau kecelakaan (UNODC 1998, 17).

Semakin tingginya penyalahgunaan narkotika ini juga memberikan dampak ekonomi terhadap suatu negara. Upaya suatu negara dalam menekan *drug trafficking*, tentu akan meningkatkan anggaran polisi, militer, maupun penegakan hukum. Yang mana anggaran tersebut sebenarnya bisa saja digunakan pemerintah dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Penggunaan narkotika juga dapat mengurangi kualitas sumber daya suatu negara (UNODC 1998, 27-28).

**Tabel 3.3. Kerugian Ekonomi Amerika Serikat Akibat DTO 2009**

(Dalam \$)

<b>Bidang</b>	<b>Kekerasan</b>	<b>Kejahatan Properti</b>
Kesehatan	216,52	0.00
Kehilangan dan Kerusakan Properti	73,21	3683,55
Produktivitas (Market Productivity Value)	660,42	408,22
Produktivitas (Household Productivity Value)	173,72	168,52
<b>Total</b>	1123,87	4260,29

**Sumber:** (Center 2011, 16)

Amerika Serikat menyatakan bahwa pada tahun 2007, negaranya telah mengalami kerugian ekonomi berkaitan dengan narkoba sebesar \$193 miliar. Yang mana sebesar \$120 miliar kerugian yang digunakan untuk partisipasi dalam permasalahan perdagangan narkoba, penyalahgunaan narkoba, penahanan dan partisipasi sumber daya. Selain itu \$11 miliar digunakan untuk perawatan kesehatan, dan \$61 miliar untuk peradilan pidana. Hal ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tabel di atas mengenai kerugian ekonomi yang didapat oleh Amerika Serikat pada tahun 2009 (President 2011, 1).

Dalam pendanaan sesi kedua, Meksiko dan Amerika Serikat juga merevisi tujuan mereka dalam *Merida Initiative*. Pada tahun 2011, pemerintah kedua negara memperluas upaya kerja sama dengan memprioritaskan pembangunan institusi yang berisikan:

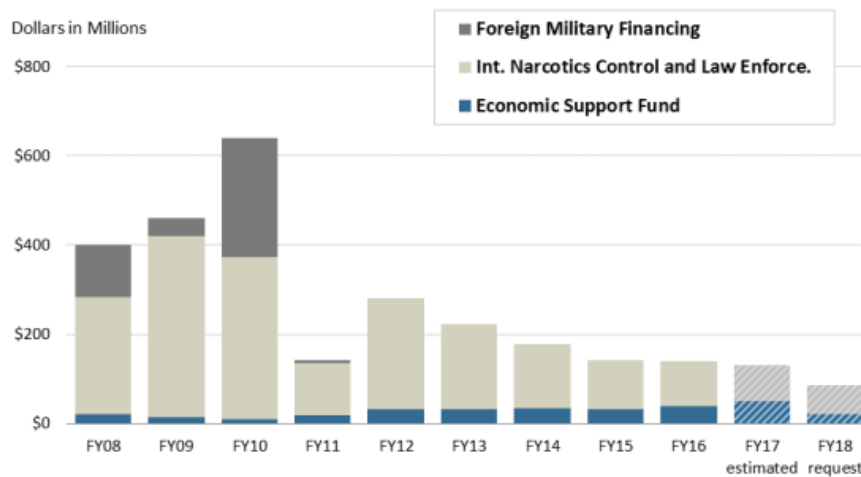
1. Memerangi organisasi kriminal transnasional
2. Menegakan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia
3. Menciptakan struktur perbatasan abad ke-21 Amerika Serikat dan Meksiko
4. Membangun resiliensi komunitas yang kuat (Seelke 2020).

Adanya revisi tujuan dari *Merida Initiative* ini juga disebabkan oleh salah satu isu, yaitu menyadari tidak adanya perubahan yang signifikan, karena DTO yang menyesuaikan aktivitas mereka dengan sistem penegakan hukum yang berkembang. Oleh karena itu dengan pembentukan empat pilar baru ini, menjadi langkah awal keberhasilan *Merida Initiative* (Seelke 2020).

Tidak seperti pada sesi pertama yang memfokuskan alokasi dana untuk kekuatan militer, pada sesi kedua anggaran dana *Merida Initiative* lebih difokuskan

untuk meningkatkan penegakan hukum dan pengendalian narkoba. Hal ini dapat dilihat melalui grafik dibawah ini.

**Grafik 3.6. Pembagian Anggaran Dana *Merida Initiative***



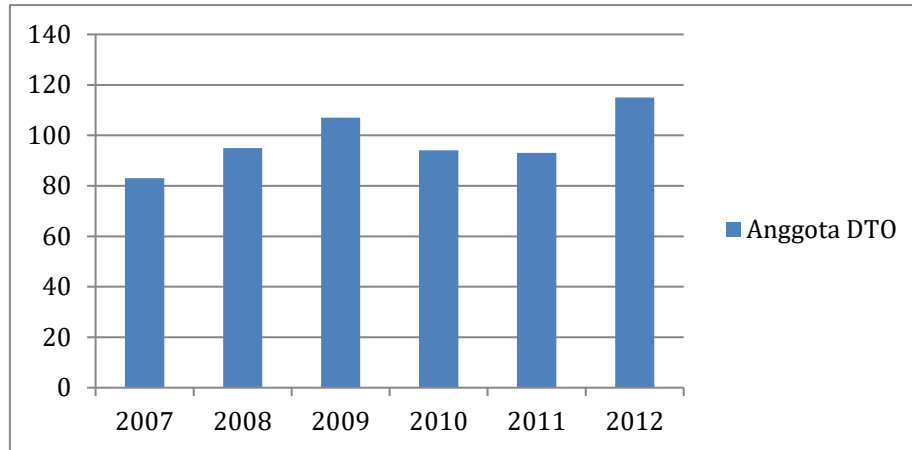
**Sumber:** (Seelke and Finklea 2017, 16)

Seperti apa yang dinyatakan Holsti kerja sama internasional berisi mengenai tindakan dan tingkah laku para negara, yang mana negara akan merumuskan tujuan-tujuan mereka dan memilih diantara sekian banyak tindakan, dan menggunakan kapasitas nasional mereka untuk mencapai tujuan. Dalam bertindak demi upaya mencapai tujuan masing-masing negara, pasti akan terdapat peluang dan hambatan yang dihadapi (Holsti 1987, 23-24).

Dalam kerja sama *Merida Initiative* ini, salah satu upaya yang digerakkan oleh kedua negara ialah dengan memperkuat sistem militer. Setelah kedua negara menjalankan kebijakan, pada tahun 2008 kerja sama antara polisi dan militer berhasil menyita 300.000 kg narkoba yang dikirim ke Amerika Serikat. Pada kurun waktu tersebut Meksiko juga menerima akreditasi internasional untuk

penjara, laboratorium, serta lembaga pelatihan polisi dan militernya. Selain itu itu Calderon berhasil menangkap dan mengekstradisi anggota kartel ke Amerika Serikat (Seelke 2020, 2).

**Grafik 3.7. Ekstradisi Anggota DTO Meksiko ke Amerika Serikat 2007-2012**



**Sumber:** (Seelke and Finklea 2015, 20)

Menurut Holsti yang menyebabkan suatu kerja sama terhambat ialah kurangnya koordinasi dan perencanaan yang terinci serta banyaknya perselisihan atau ketidaksepakatan antar dua negara. Apabila hal itu terjadi, maka akan menyebabkan suatu kerja sama tersebut hanya akan bersifat formalitas dan tidak benar-benar nyata (Holsti 1987, 159).

Terdapat pula beberapa kendala dalam pengimplementasian Merida, seperti jumlah staf yang tidak mencukupi untuk mengelola program, negosiasi yang kurang lancar mengenai perjanjian antar lembaga dan bilateral, serta perubahan dalam pemerintah, yaitu pergantian masa jabatan presiden Amerika Serikat dari George W. Bush ke Barack Obama (E. L. Engel 2010, 15). Pada akhirnya di bulan Desember 2009, GAO (U.S Government Accountability Office)

mengeluarkan korespondensi yang merinci status pendanaan Merida. Laporan ini adalah tinjauan implementasi yang luas dan termasuk pembaruan pendanaan. Isi dari laporan ini sendiri ialah mengenai status pendanaan Merida, strategi negara untuk pelaksanaan implementasi, dan mekanisme koordinasi untuk Merida (E. L. Engel 2010, 2).

Selain itu salah satu permasalahan besar dan sulit di atasi oleh Meksiko sendiri ialah kasus korupsi yang masih marak terjadi. Berdasarkan indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh *Transperancy Internatonal* ditahun 2011, Meksiko berada diperingkat 100 dari 182 negara, dengan peringkat level 3 dari skala 0-10. Dimana level 0 adalah posisi tertinggi negara dengan kasus korupsi, dan level 10 adalah posisi tertinggi negara yang bersih dari kasus korupsi (Nieto 2012, 24).

Berdasarkan indikator dalam mengendalikan kasus korupsi yang dikeluarkan oleh World Bank, Meksiko mendapat poin -0,26. Dimana -2,5 merupakan level terburuk suatu pemerintahan, dan 2,5 adalah level terbaik suatu pemerintahan dalam menangani kasus korupsi (Nieto, Political Corruption and Narcotrafficking in Mexico 2012, 24). Dilihat dari transparansi di atas, dapat dikatakan bahwa kasus korupsi masih marak terjadi di Meksiko. Hal ini terbukti ditahun 2008, dimana terungkap bahwa beberapa jajaran dari kejaksaan agung bagian organisasi kriminal telah bekerja sama dengan DTO. Dinyatakan bahwa jajaran tersebut telah menerima suap dari kartel *Beltran-Leyva Brothers*. Pada November 2008, akhirnya jajaran tersebut ditahan karena telah menerima suap dan bekerja sama dengan organisasi kriminal. Adapun kasus korupsi lainnya muncul dari jajaran menteri keamanan publik, yaitu Victor Gerardo Garay Cadena

yang menerima suap dari kartel untuk membocorkan informasi dan melindungi kartel narkoba (Chabat 2010, 12).

Tingginya kasus korupsi yang datang dari jajaran pemerintah dan lemahnya penegakan hukum di Meksiko menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kedua hal tersebut menimbulkan dukungan dalam negeri di Meksiko sulit terealisasi, terutama kasus korupsi yang masih menjadi permasalahan besar yang sulit di atasi oleh Meksiko sendiri. Hal ini juga tentu mempengaruhi implementasi dari Merida Initiative, beberapa jajaran pemerintah yang melakukan kerja sama dan membantu melindungi organisasi kriminal.

Dalam bab II dan III sudah dijelaskan mengenai faktor terbentuknya kerja sama Meksiko dan Amerika Serikat dalam *Merida Initiative*. Penjelasan ini sesuai dengan teori kerja sama internasional Holsti, faktor dari terbentuknya kerja sama ini karena Meksiko tidak mampu menyelesaikan permasalahan DTO di negaranya dan Amerika Serikat yang memiliki ancaman yang sama karena terkena dampak dari isu *Drug Trafficking* (DTO) di Meksiko. Sehingga kedua negara sepakat dan merumuskan tujuan-tujuan kebijakan didasarkan dari kepentingan masing-masing negara dalam *Merida Initiative*. Meskipun terdapat beberapa hambatan, kedua negara tetap berupaya dari tahun ketahun untuk meningkatkan dan mengevaluasi kinerja untuk mencapai tujuan masing-masing negara dan melihat peluang kedepannya untuk keberhasilan *Merida Initiative*.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Kejahatan transnasional merupakan permasalahan yang serius dan rumit bagi negara yang terkena dampaknya. Salah satu ancaman yang diberikan dari kejahatan transnasional ini dapat berbentuk sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas suatu negara. Kejahatan narkoba merupakan contoh dari kejahatan transnasional yang kerap terjadi antar negara.

Hal ini dapat dilihat dari kejahatan narkoba yang ditimbulkan oleh *Drug Trafficking Organizations* (DTO) di Meksiko, yang juga memberikan dampak bagi negara tetangganya, yaitu Amerika Serikat. Pada awalnya DTO di Meksiko ini hanya merupakan suatu kelompok yang bertransaksi atas narkoba. Akan tetapi semenjak diberlakukan penegakan hukum yang cukup kuat pada akhir tahun 2006, DTO memberikan perlawanan untuk mempertahankan kelompoknya dengan melakukan kejahatan lain seperti pembunuhan, *human trafficking*, perampokan, dll.

Melihat hal tersebut, Meksiko menuai banyak kecaman dari berbagai pihak, yang menimbulkan tekanan bagi pemerintah Meksiko untuk secepatnya mengambil langkah serius untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada tahun 2007, pemerintah Meksiko sepakat untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam *Merida Initiative*. Yang mana dalam perjanjian tersebut Amerika Serikat memberikan bantuan dana untuk Meksiko sebagai upaya melawan DTO di Meksiko.

Pengambilan keputusan antar kedua negara dalam kesepakatan ini tentu saja didasari oleh satu dan lain hal. Ancaman serupa yang diberikan DTO kepada kedua negara merupakan salah satu alasan kuat bagi kedua negara untuk bekerja sama. Selain itu lemahnya perekonomian Meksiko menjadi suatu tantangan dalam memberantas DTO. Sehingga Meksiko melihat Amerika Serikat sebagai salah satu negara dengan perekonomian terkuat, dapat menjadi suatu peluang bagi Meksiko dalam mengatasi permasalahan *Drug Trafficking Organizations* (DTO) di negaranya.

#### **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil temuan dan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, rekomendasi yang dapat diberikan untuk kepentingan penelitian selanjutnya ialah penelitian lebih lanjut mengenai teknis implementasi *Merida Initiative* di negara bagian Meksiko. Hal ini menjadi saran dari penulis karena tulisan ini hanya berkisar pada keseluruhan kasus yang berpusat di Meksiko. Penulis berharap penelitian lanjutan yang serupa tersebut dapat menjadi acuan untuk mengetahui akar permasalahan secara lebih luas dan sebagai penilaian efektivitas dari *Merida Initiative*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Hamdeh, Sabrina. "The Merida initiative: an effective way of reducing violence in Mexico?." (2011).
- Astorga, Luis, and David A. Shirk. "Drug trafficking organizations and counter-drug strategies in the US-Mexican context." (2010).
- Bagley, Bruce Michael. "US foreign policy and the war on drugs: Analysis of a policy failure." *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 30, no. 2-3 (1988): 189-212.
- Beqiraj, Julinda, and Richard Mackenzie-Gray Scott. "Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters in The UK And in Developing Countries: A Scoping Study." (2022).
- Brands, Hal. "Mexico's narco-insurgency and US counterdrug policy." (2009).
- Cadot, Olivier, and Mariem Malouche. *Non-tariff measures: A fresh look at trade policy's new frontier*. No. 136830. The World Bank, (2012).
- Canning, Brianna Madison. "The Mérida Initiative and the Violence of Transnational Criminal Organizations in Mexico." (2021).
- Cardash, Sharon L., Frank J. Cilluffo, and Bert B. Tussing. *Mexico and the Triple Threat*. Center for Cyber and Homeland Security at Auburn University. (2011).
- Chabat, Jorge. "Combatting drugs in Mexico under Calderón: the inevitable war." (2010).
- Correa-Cabrera, Guadalupe, Michelle Keck, and José Nava. "Losing the monopoly of violence: The state, a drug war and the paramilitarization of

- organized crime in Mexico (2007–10)." *State Crime Journal* 4, no. 1 (2015): 77-95.
- De la Torre, Luis V. "Drug trafficking and police corruption a comparison of Colombia and Mexico". (2008).
- Drug Enforcement Administration. "Drug Intelligence Brief". Beijing: Drug Enforcement Administration (DEA). (2004).
- Duran-Martinez, Angelica. "Criminals, cops, and politicians: The dynamics of drug violence in Colombia and Mexico." (2013).
- Engel, Eliot L. "The United States Has Provided Counternarcotics and Anticrime Support but Needs Better Performance Measures (2010).
- Engel, Elliot L. "Status of Funds for the Mérida Initiative ." (2009).
- Finckenauer, James O., Joseph R. Fuentes, and George L. Ward. "Mexico and the United States: Neighbors confront drug trafficking." *United Nations Activities* (2007).
- Freeman, Laurie. "State of Siege: drug-related violence and corruption in Mexico." *WOLA Special Report, Washington Office on Latin America, June* (2006).
- Gracia, Dominic. "The Merida Initiative, A Flawed Conception." (2012).
- Grayson, George W. *The Impact of President Felipe Calderón's War on Drugs in the Armed Forces: The Prospects for Mexico's "Militarization" and Bilateral Relations (Enlarged Edition)*. (2013).
- Gurule, Jimmy. "The 1988 UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances-A Ten Year Perspective: Is International Cooperation Merely Illusory." *Fordham Int'l LJ* 22 (1998).

- Hanson, Major J.G. "Presiden Felipe Calderon's 'War Against Organized Crime': Treating The Symptoms But Not The Sickness." (2013).
- Holsti, Kalevi Jaakko, and Juwono Sudarsono. *Politik Internasional: Kerangka Analisa*. Pedoman Ilmu Jaya. (1987).
- Horton, Gillian. "Conflict in Michoacán: Vigilante Groups Present Challenges and Opportunities for the Mexican Government." (2014).
- Jenzen-Jones, N. R. "Producers of Small Arms, Light Weapons, and Their Ammunition." (2014).
- Kendall, Virginia M., and T. Markus Funk. "The Role Of Mutual Legal Assistance Treaties In Obtaining Foreign Evidence". (2013).
- Longmire, Sylvia M., and John P. Longmire. "Redefining terrorism: Why Mexican drug trafficking is more than just organized crime." *Journal of Strategic Security* 1, no. 1 (2008).
- López, Jorge Alberto, Óscar Rodil, and Saúl Vadez. "The impact of China's incursion into the North American Free Trade Agreement (NAFTA) on intra-industry trade." *Cepal Review* (2014).
- Lupsha, Peter A. "Drug trafficking: Mexico and Colombia in comparative perspective." *Journal of International Affairs*. (1981).
- Medina-Mora, M. E., P. Cravioto, A. Ortiz, P. Kuri, and J. Villatoro. "Mexico: systems for the epidemiological diagnosis of drug abuse." *Bulletin on Narcotics* 55, no. 1-2 . (2003).
- Meyer, Maureen, Coletta Youngers, and Dave Bewley-Taylor. "At a crossroads: Drug trafficking, violence and the Mexican state". (2007).

Miraglia, Paula, Rolando Ochoa, and Ivan Briscoe. "Transnational organised crime and fragile states." (2012).

Nieto, Nubia. "Political corruption and narco trafficking in Mexico." *Transcience* 3, no. 2 (2012).

Office Of National Drug Control Policy. "How Illicit Drug Use Affects Business and The Economy". Office Of National Drug Control Policy. (2011). Retrieved from <https://obamawhitehouse.archives.gov>

Office of The Press Secretary. "Fact Sheet on Law Enforcement" (2001). Retrieved from <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/text/20010905-10.html>

Organization of American States. "*Ex-Post Evaluation of The Implementation of The EU Mexico Free Trade Agreement*". Luxembourg: European Commission". (2017).

Rodríguez Luna, Armando. "Aims and Limits of the Mérida Initiative." *Voices of Mexico* (2018).

SAMHSA. "Results From the 2012 National Survey on Drug Use and Health: Summary of National Findings". (2013). Retrieved from <https://www.samhsa.gov/>

Seelke, Clare Ribando, and Kristin Finklea. "U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond." Congressional Research Service. (2017).

Seelke, Clare Ribando, and Kristin Finklea. "U.S.-Mexican Security Cooperation: The Merida Initiative and Beyond". Washington: Congressional Research Service. (2015).

- Seelke, Clare Ribando. "Mexico: Evolution of the Mérida Initiative, 2007-2020". Washington: Congressional Research Service. (2020).
- Seelke, Clare Ribando. "*Mérida Initiative for Mexico and Central America: funding and policy issues*". (2010).
- Storrs, K. Larry. "Mexican Drug Certification Issues: U.S. Congressional Action, 1986-2001". Congressional Research Service (CRS). (2001).
- The Council of The EU . "EU-Mexico Summit, Brucells, 12 June 2015". (2015). Retrieved from <https://www.consilium.europa.eu/>
- The State of Council of The Peoples Republic of China. "*Narcotics Control in China*". (2002). Retrieved from <http://qa.china-embassy.gov.cn/>
- U.S Department Of Justice National Drug Intelligence Center. "The Economic Impact of Illicit Drug Use on American Society." (2011).
- UNODC. "Economic And Social Consequences of Drug Abuse And Illicit Trafficking". (1998).
- UNODC. "Drug Statics and Trends: Understanding The Extent and Nature of Drug Use". (2010).
- UNODC. "Recent Statics and Trend of The Illicit Drug Market". (2014).
- UNODC. "United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances". (2005).
- Windle, James, and Graham Farrell. "Popping the balloon effect: Assessing drug law enforcement in terms of displacement, diffusion, and the containment hypothesis." *Substance Use & Misuse* 47, no. 8-9 (2012).
- Wright, Hamilton. "The International Opium Commission." *American Journal of International Law* 3, no. 4 (1909).